**BAB I**

**SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA**

**Standar Kompetensi :**

Memahami dan mampu menganalisis sistem perekonomian di Indonesia.

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa mampu menganalisis latar belakang munculnya sistem dan pengertian, ciri sistem dan penggunaannya serta mahasiswa mampu memahamiperkembangan sistem perekonomian Indonesia dan para pelaku ekonomi.

1. **Konsep Sistem Ekonomi**

Latar belakang dari munculnya sistem adalah sistem muncul karena usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Istilah “sistem” berasal dari perkataan “systema” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai : keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Suatu sistem dapat diartikan seperangkat komponen, yang saling berhubungan satu sama lain, memiliki batas yang menseleksi baik macamnya maupun banyaknya input yang masuk dan output yang keluar dari sistem tersebut.

Setiap negara atau bangsa di dunia ini memiliki 3 persoalan dasar, organisasi ekonomi yang sama, yaitu barang apa, bagaimana dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Pemecahan terhadap ketiga persoalan dasar tersebut dilakukan oleh setiap negara atau bangsa dengan cara yang berbeda, tergantung pada sistem ekonomi yang dianutnya.

Pengertian lain dari Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebagai bagian dari sistem sosial, sistem ekonomi mengandung unsur-unsur tujuan, nilai-nilai, sikap dasar, otoritas kepemimpinan, dan struktur kekuasaan. Sedangkan sistem itu sendiri muncul karena usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga, sistem ekonomi Indonesia yaitu seluruh lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan bangsa Indonesia dalam mengelola segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.

Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tesebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (*planned economies*) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. Cina, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.

Pada perekonomian pasar (*market economies*), pasarlah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan. Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan dimana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.

Sementara, perekonomian pasar campuran (*mixed market economies*) adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar ataupun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (*advertising*), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi (pengubahan status perusahaan pemerintah menjadi perusahaan swasta).

Tugas pokok sistem ekonomi:

1. Apa yang akan diproduksi
2. Bagaimana barang dan jasa diproduksi
3. Bagaimana agar hasil diproduksi bisa didistribusikan
4. Menentukan masalah sekarang dan yang akan datang mengenai penggunaan sumber-sumber yang ada untuk pertumbuhan ekonomi dan pembagian pendapatan nasional yang adil dan merata.

Ada 5 (lima) kriteria yang perlu diamati dalam menilai suatu sistem ekonomi, yaitu:

1. Dapatkah menghasilkan standar hidup yang lebih meningkat secara cepat dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.
2. Kemerdekaan ekonomi bagi masing-masing individu.
3. Mewujudkan keamanan dan perlindungan ekonomi.
4. Mampukah memproduksi, konsumsi, distribusi barang dan jasa yang diinginkan konsumen.
5. Distribusi pendapatan nasional yang adil dan merata.

Dari beberapa pengertian sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari:

* + - * 1. Unsur-unsur sistem (kelompok orang, mesin, dll)
        2. Tujuan (menghasilkan produk, keuntungan ekonomi, dll)
        3. Kegiatan untuk mencapai tujuan (skema/prosedur)
        4. Proses (data, bahan-bahan atau gabungan)
        5. Hasil dari proses (informasi, barang)
        6. Keberhasilan proses tersebut (waktu yang dicapai)

Ciri-ciri sistem yaitu:

1. Punya tujuan
2. Terdapat batas yang memisahkan dengan lingkungannya
3. Sistem bersifat terbuka
4. Terdiri dari beberapa komponen/unsur dan saling berhubungan
5. Ada mekanisme control sehingga mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau keadaan secara otomatis.

Secara singkat dan umum dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran.

1. **Unsur-unsur Sistem Ekonomi**

Setiap sistem sekurang-kurangnya terdiri dari lima unsur, yaitu: elemen sistem, fungsi elemen, hubungan antar elemen, pranata (institusi) ekonomi, dan tujuan sistem ekonomi.

(1) Elemen-elemen Sistem Ekonomi

Unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor dan pejabat-pejabat yang terkait.

Lingkungan Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Kapital (SDK), Sumber Daya Teknologi (SDT).

(2) Fungsi Elemen Sistem Ekonomi

a.Masing-masing elemen (unit-unit ekonomi, pelaku-pelaku ekonmi) mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi, seperti fungsi-fungsi produksi, konsumsi, distribusi, injvestasi, regulasi.

b. Bagaimana hasil dari kegiatan ekonomi sangat tergantung bagaimana elemen-elemen sistem ekonomi tersebut menjalankann fungsinya. Dalam perjalanan fungsinya, setiap elemen bisa fungsional, bisa non fungsional atau disfungsional.

1. Hubungan antar Elemen Sistem Ekonomi

Unit-unit ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, SDA dan SDM saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola hubungan tertentu, sehingga menimbulkan proses kegiatan ekonomi.

Pola-pola hubungan tergantung dari sifat hubungan antar elemen, sebab hubungan-hubungan itu ada yang bersifat interelasi, interaksi dan interdependensi serta hubungan fungsional, kausal.

Dengan demikian proses kegiatan ekonomi bisa berlangsung secara efisien, tidak efisien atau produktif, kurang produktif, karena perbedaan dalam menjalankan fungsi elemen dan pola hubungan elemen.

(4) Pranata (Institusi) Ekonomi

* + - * 1. Karena adanya hubungan antar elemen maka timbul produk kegiatan ekonomi, yang berlangsung secara berulang-ulang dan teratur menurut pola tertentu, sebab ada mekanisme (prosedur) yang mengaturnya.
        2. Mekanisme atau prosedur (aturan main) yang mengendalikan proses kegiatan ekonomi itu disebut institusi ekonomi yang terdiri dari :

1. Norma hidup, seperti norma agama, adat-istiadat, tradisi, etika profesi.
2. Peraturan hidup, seperti konstitusi (UUD), undang-undang, peraturan pemerintah (PP), Peraturan Darah (Perda), Keputusan Presiden (Keppres), Surat Keputusan/ Surat Edaran Pejabat Resmi, Perjanjian-perjanjian Bilateral/ Internasional.
3. Paham Hidup, seperti pandangan hidup, cra hidup, ideologi. (Grossman, Gregoary, 1967).

(5) Tujuan Sistem Ekonomi

Tujuan sistem ekonomi suatu bangsa atau suatu negara pada umumnya meliputi empat tugas pokok:

* 1. Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan.
  2. Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi.
  3. Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantara anggota masyarakat : sebagai upah/ gaji, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa.
  4. Memelihara dan meningkatkann hubungan ekonomi dengan luar negeri. (Grossman, Gregoary, 1967).

Sistem digunakan sebagai suatu kumpulan benda yang disatukan dan saling berhubungan satu dengan yang lain secara teratur serta digunakan untuk menunjuk pengertian skema, metode pengaturan organisasi, dan susunan sesuatu atau model tatacara.

1. **PENDEKATAN MELALUI SISTEM EKONOMI** 
   * + 1. Beberapa Pendekatan dalam Ilmu Ekonomi

a) Istilah “sistem” dapat dipergunakan dalam pengertian bermacam-macam sesuai dengan lingkup persoalan yang dihadapi, diantaranya adalah :

(1) Istilah “sistem” yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara untuk memahami sesuatu persoalan atau sesuatu pekerjaan.

Misalnya, Sistem pembayaran Her Regrestasi Mahasiswa.

(2) Istilah “sistem” yang menunjukkan adanya sekumpulan (himpunan) gagasan-gagasan (ide); yang mengandung prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, hukum-hukum, yang tersusun terorganisasikan dalam satu kesatuan yang logik.

Misalnya, sistem ekonomi campuran.

Istilah sistem (sistem ekonomi) di sini dipergunakan dalam pengertian yang pertama. Istilah sistem ekonomi yang tersusun dari lima unsur sebagaimana diuraikan di atas digunakan sebagai konsep pendekatan, sebagai salah satu alat analisis dalam memahami persoalan ekonomi, khususnya memahami persoalan ekonomi Indonesia.

* + 1. Selama ini kita telah terbiasa memahami persoalan-persoalan ekonomi dengan pendekatan Teori Ekonomi Mikro, Teori Ekonomi Makro, Teori Keuangan dan lain-lain. Umumnya kita belum biasa menggunakan pendekatan sistem (*system approach*) untuk memahami dan memecahkan persoalan-persoalan ekonomi.
    2. Tujuan dari pengajaran teori pada umumnya dan teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro pada khususnya, yaitu *interalia*, menunjukkan cara-cara untuk menangkap dan menyederhanakan serta memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Untuk maksud ini disamping perlu uraian tentang konsep-konsep guna mencari hubungan sebab-akibat (causal) atau interdependensi antara semua unsur-unsur yang terkandung dalam konsep itu secara verbal, dipergunakan pula alat-alat analisa grafis dan matematis (Sudarsono, 1983).
       1. Kelebihan Pendekatan Sistem Ekonomi
    3. Pendekatan sistem ekonomi melihat persoalan ekonomi secara utuh, sistem ekonomi dipandang sebagai suatu totalitas. Dengan demikian setiap persoalan ekonomi yang kita hadapi, kita lihat secara menyeluruh, dilihat dari kelima unsur sistem ekonomi sehingga seluruh fakta yang berkaitan dengan persoalan tersebut bisa terungkap secara lengkap.
    4. Penerapan cara pendekatan sistem bisa membantu kita mencapai suatu efek sinergistik (*synergistic effect*), dimana tindakan-tindakan berbagai bagian yang berbeda dalam sistem itu yang dipersatukan, menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dari pada bagian-bagian yang beraneka ragam itu.

1. **PERBANDINGAN SISTEM-SISTEM EKONOMI**

Sepanjang sejarah telah dikenal beberapa bentuk sistem ekonomi yang berlaku di berbagai negara di dunia ini. Pengklasifikasian bentuk-bentuk sistem ekonomi tersebut adalah didasarkan pada cara atau aturan bagaimana sistem yang berlaku itu membuat keputusan-keputusan dasar tentang produksi, distribusi dan konsumsi, di mana cara atau aturan tersebut merupakan perncerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang biasanya disebut sebagai falsafah hidup atau ideologi. Apakah kekuasaan mengambil keputusan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut dikonsentrasikan di tangan beberapa orang saja atau bahkan satu orang saja yang akan berkuasa mutlak, ataukah akan didistribusikan di antara banyak orang.

Berdasarkan pengklasifikasian di atas, maka dikenal dua bentuk sistem ekonomi yang sangat berlawanan, yaitu sistem kapitalisme (liberalisme) dan sistem sosialisme. Dari kedua sistem ekonomi yang ekstrim ini muncul satu bentuk sistem ekonomi yang menggabungkan keduanya dengan cara mengambil kebaikan-kebaikan sistem kapitalisme dan sosialisme, yaitu sistem ekonomi campuran (demokratis).

Ada dua cara penggolongan sistem ekonomi, yaitu:

*Pertama* berdasarkan yang mengatur mekanisme :

a) Sistem ekonomi tradisional,

b) sistem ekonomi pasar,

c) sistem ekonomi komando/ terpimpin.

*Kedua* berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset:

a) sistem ekonomi kapitalis,

b) sistem ekonomi sosialis,

c) sistem ekonomi campuran, (Grossman, Gregory, 1967).

a)Sistem Ekonomi Kapitalis (Kapitalisme)

* + - 1. Ciri-ciri Kapitalisme

(a) Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi

* + Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu
  + Inidividu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.

(b) Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar

* Pasar berfungsi memberikan “tanda” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga.
* Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “*The Invisible Hand*” yang mengatur perekonomian menjadi efisien.

Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba

* Manusia dipandang sebagai mahluk *homo-economicus*, yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri.
* Paham individualisme didasarkan materialisme,warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).
  + - 1. Kebaikan-kebaikan Kapitalisme:

a. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.

b.Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.

c. Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

* + - 1. Kelemahan-kelemahan Kapitalisme

a. Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.

b.Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

(4) Kecenderungan Bisnis dalam Kapitalisme

Perkembangan bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme dewasa ini: a) adanya spesialisasi, b) adanya produksi massa, c) adanya perusahaan berskala besar, d) adanya perkembangan penelitian.

* + 1. Sistem Ekonomi Sosialis (Sosialisme)
       1. Ciri-ciri Sosialisme
    - Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme)
    - Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka.
    - Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.
    - Peran pemerintah sangat kuat
    - Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.
    - Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.
    - Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi
    - Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis).
    - Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis).
      1. Kelemahan-kelemahan Sosialisme

(a) Teori pertentangan kelas tidak berlaku umum

* + - Tidak banyak kasus, hanya terjadi pada saat revolusi industri (abad pertengahan) dan revolusi Bolsevik tahun 1917).
    - Di India banyak kasta, tapi tidak pernah terjadi revolusi sosial.
      1. Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan

Maka kreativitas masyarakat tehambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan mandeg.

Tidak ada insentive untuk kerja keras

Maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur.

Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi

Karl Marx hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. (Deliarnov, 1995).

(3) Sosialisme tidak sama dengan komunisme

* + Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme.
  + Komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat (*The Six Major Historical Stages*): primitive, communism, slaery feudalism, capitalism, sosialism dan full communism.

(Grossman, Gregoary: 1967).

c) Sistem Ekonomi Campuran (*Mixed Economy*)

* 1. Ciri-ciri Ekonomi Campuran
* Kedua sektor ekonomi hidup berdampingan

Ada kegiatan ekonomi yang dilakukan pribadi (swasta) dan sebagian lagi (yang menyangkut hidup orang banyak) dikelola oleh negara/ pemerintah.

* Interaksi ekonomi terjadi di pasar

Tapi di sana sini ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan.

* Persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan

Tetapi gerak-geriknya diawasi oleh pemerintah agar tidak mengarah saling merugikan (mencegah konsentrasi ekonomi/ monopoli).

* 1. Campur Tangan Pemerintah

a. Ada yang sifatnya keras, ada yang lunak

* + - * 1. Keras : sifat menyeluruh, merencanakan, melaksanakan, mengawasi
        2. Lunak: melakukan perencanaan melalui mekanisme pasar untuk menjamin pemerataan dan keadilan.

1. Alasan perlunya campur tangan pemerintah:
   * + - 1. Mencegah perusahaan-perusahaan besar turut mempengaruhi kebijaksanaan politik dan ekonomi
         2. Mencegah organisasi buruh (gabungan) menekan pengusaha dalam menentukan harga barang
   1. Peran dan Campur Tangan Pemerintah Indonesia
      * + 1. Amanat Konstitusi (pembukaan UUD 1945): memajukan kesejahteraan umum, memajukan kecerdasan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
          2. Pasal 33, 34, dan 27 ayat 2(Undang-Undang Dasar 1945), menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat melalui antara lain:

1. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting

2. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar

3. Penyediaan lapangan kerja.

d) Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)

Rumusan Mubyarto (mengacu pada GBHN)

Sistem Ekonomi Pancasila tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian (Mubyarto, 1988).

Rumusan Emil Salim (mengacu pada Pancasila dan UUD 1945)

Landasan Filosofis : PANCASILA

Landasan Konstitusional : UUD – 1945

Landasan Operasional : GBHN

* Demokrasi pancasila dan demokrasi ekonomi
* Konsep “Tinggal Landas”: dari ajaran WW. Rostow (*the Stages of Economic Growth*) :
  + - * + Tahap “*traditional society*” (tradisonal statis)
        + Tahap “*precondition for take-off*” (Masa transisi)
        + Tahap “*take-off*” (lepas landas: disyaratkan antara lain tingkat investasi lebih 10% Pendapatan Nasional)
        + Tahap “*the drive to maturity*” (Economi sudah matang/ dewasa)
        + Tahap “*The age of high mass consumption*” (konsumsi massa yang melimpah) (B.S. Muljana, 1983).
* Trilogi Pembangunan:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi

2. Pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan

3. Stabilitas nasional yang mantap

* Pembangunan Jangka panjang dan Pembangunan Lima Tahun
* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1. **PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA**

Dumairy (1996) mengatakan bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu *supra system* kehidupan masyarakat. Sebagai supra sistem kehidupan, sistem ekonomi berkaitan erat dengan sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Tujuan sistem perekonomian adalah mengatur pertukaran barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat.

Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu Negara. Artinya bahwa sistem perekonomian juga merupakan bagian sistem politik. Kebijakan politik sering didasarkan pada masalah ekonomi dan sebaliknya. Maka pelaksanaan sistem ekonomi tertentu akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.

Pada hakekatnya, bentuk struktur perekonomian Indonesia merupakan *resultante* dari hasil bangunan ekonomi zaman kolonial. Pada zaman kolonial tersebut telah terbentuk apa yang disebut “dualisme” dalam struktur perekonomian, yaitu antara sektor perekonomian yang berorientasi ekspor dan yang masih tradisional. Pada saat itu, banyak sekali daerah yang dijadikan sebagai perkebunan besar untuk menghasilkan barang-barang ekspor, dengan pola kehidupan serba cukup/modern, sementara itu sekelilingnya terdapat masyarakat tradisional agraris dengan kehidupan subsistem dan miskin. Keadaan ini melahirkan apa yang disebut “*eclave economy*”, yaitu daerah kecil yang mempunyai kondisi perekonomian modern di tengah kehidupan masyarakat tradisional yang serba subsistem dan miskin, yang mana dari kedua pola kehidupan tersebut tidak terjadi saling keterkaitan (*inkage*). Selanjutnya, dualisme tersebut melahirkan pula dualisme berikutnya, yaitu “dualisme kota-desa”. Daerah pedesaan yang agraris-tradisional tetap tertinggal dengan pola subinstansi karena darerah tersebut, kecuali daerah yang dijadikan penghasil produksi ekspor, tidak dikembangkan perekonomiannya oleh penjajah. Sedangkan daerah perkotaan diupayakan untuk ditumbuhkan guna mendukung kepentingan kegiatan ekspor, sehingga daerah perkotaan ini dapat berkembang dengan sangat pesat dibandingkan daerah pedesaan. Kemudian, dualisme-dualisme tersebut semakin diperkuat lagi oleh hukum undang-undang kolonial Belanda dengan mengeluarkan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang dibagi dalam tiga golongan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, yaitu: 1) Golongan orang kulit putih menduduki perekonomian yang kuat, seperti perkebunan-perkebunan besar dengan bantuan sepenuhnya dari pemerintah Hindia Belanda; 2) Golongan menengah yang sebagian besar diduduki oleh orang Cina dan Timur asing lainnya sebagai alat penghubung ekonomi dengan masyarakat pribumi; 3) Golongan pribumi yang tidak mempunyai alat pertahanan dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern dan menduduki posisi terendah.

Struktur perekonomian dualistik yang penuh ketimpangan tersebut menyebabkan terjadinya proses disintegrasi (kehancuran) sosial ekonomi masyarakat pribumi, terutama yang berada di daerah pedesaan. Proses disintegrasi yang timbul didasarkan pada ciri-ciri yaitu:

Terdesaknya unit usaha keluarga, bahkan ada yang kehilangan modal utamanya, yaitu tanah.

Tumbuhnya golongan baru di daerah pedesaan, yaitu petani yang swakarya tetapi tidak memiliki tanah, dan buruh tani yang tidak mempunyai tanah.

Mulai rubuhnya kepercayaan pada diri sendiri.

Retaknya keseimbangan kesatuan sosial desa dengan lingkungannya.

Sebelum perekonomian kolonial Belanda masuk, bangsa kita mengalami “Hukum Ekonomi Feodalisme” yang dibawa oleh kebudayaan Hindu. Ciri-ciri sistem ekonomi ini, antara lain adalah bahwa produksi hasil lebih dimiliki orang-orang feodal dengan jalan mengisap tenaga kaum tani yang tergantung hidupnya karena dalam proses produksi tersebut mereka tidak memiliki sendiri faktor produksi utama, yaitu tanah.

Dari gambaran di atas, diketahui bahwa mekanisme perekonomian Indonesia yang paling orisinil, yaitu berdasarkan kaidah-kaidah ekonomi gotong royong dan kemanfaatan bersama akhirnya dirusak oleh sistem ekonomi feodal dan kapitalis/liberal yang dibawa oleh penjajah Belanda, dilanjutkan oleh penjajah Jepang. Kondisi tersebut mendorong para pemimpin nasional, terutama Bung Hatta ingin mengembalikan mekanisme perekonomian yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Sehingga, lahirlah secara konsepsional, landasan bagi sistem ekonomi Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 33. Dalam penjelasan pasal tersebut diungkapkan dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua pihak, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat kita yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asar kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Hal inilah yang menyebabkan di dalam sistem perekonomian Indonesia, selain dikenal sektor swasta dan sektor publik (pemerintah) juga dikenal sektor koperasi, yang bahkan karena posisinya yang strategis dan asasi dalam kerangka sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 sebagai penjabaran Pancasila, dianggap sebagai pusat (sentral) sistem tersebut.

Kemudian, pasal 33 UUD 1945 dilengkapi oleh pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu, dilengkapi pula pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Ketiga pasal dalam UUD 1945 inilah yang menjadi landasan perekonomian Indonesia, yang kemudian dirumuskan kembali dalam GBHN 1978 yang dikenal sebagai 8 ciri positif dan 3 ciri negatif demokrasi ekonomi.

Ciri positif:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.

Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri negatif yang harus dihindari:

* + - * 1. Sistem “*Free Fight Liberalism*” yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia;
        2. Sistem “*Etatisme*” dimana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara;
        3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat

Tiga potensi kerawanan yang menjadi karakteristik perekonomian Indonesia adalah:

Potensi rawankesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah (pulau). Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor geografi.

Potensi rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di daerah pedesaan. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor demografi dan faktor budaya.

Potensi rawan perpecahan, terutama perpecahan antar suku, antar golongan (elit) politik. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor sosial-politik..

Perekonomian Indonesia dilihat dari beberapa aspek :

1. Sebagai suatu ilmu. Ilmu Ekonomi Indonesia yaitu suatu cabang ilmu Ekonomi yang menjelaskan kehidupan Indonesia.
2. Sebagai struktur Ekonomi yaitu Keseluruhan komposisi sektor-sektor ekonomi yang ada pada suatu negara.
3. Sebagai suatu sistem ekonomi. Sistem ekonomi yaitu suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Suatu sistem ekonomi mencakup nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma-norma, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.

Dilihat dari perkembangannya, bangsa Indonesia menganut sistem ekonomi campuran antara kapitalis dan sosialis. Pasal 27, 33, dan 34 UUD 1945 merupakan pasal-pasal terpenting dalam hubungannya dengan sistem ekonomi Indonesia.

Ada dua cara pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kadar sosialis atau kapitalis sistem ekonomi Indonesia, yaitu:

1. Pendekatan Faktual – Struktural, yakni menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Menggunakan rumus kesamaan Agregat Keynesian yaitu:

Y = C + I + G + (X – M)

C = Konsumsi, yang mewakili sektor perorangan dan rumah tangga.

I = Investasi, mewakili sektor usaha swasta

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor, mewakili sektor perdagangan luar negeri

M = Impor, mewakili sektor perdagangan luar negeri

Y = Pendapatan Nasional

1. Pendekatan Sejarah

Sejak merdeka - tahun 1959 : kapitalis

Tahun 1959 - Tahun 1965 : Sosialisme ala Indonesia

Tahun 1966 – Tahun 1997/1998 : selama ORBA kapitalis dan sosialis

1998 - sekarang : sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali condong ke kapitalis atau liberalis.

Berikut ini adalah perbedaan antara sistem ekonomi Indonesia yang disusun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan dua sistem ekonomi yang ekstrim, yaitu sistem ekonomi liberalisme (kapitalisme) dan sistem ekonomi sosialisme:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sistem Ekonomi Pancasila dan UUD 1945** | **Sistem Ekonomi Liberalisme/Kapitaslime** | **Sistem Ekonomi Sosialisme** |
| * + - 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. | Perekonomian dibiarkan berjalan atas inisiatif individu-individu dengan kebebasan sebesar-besarnya. | Perekonomian dipaksakan sebagai usaha bersama berdasar atas ketentuan-ketentuan menurut rencana pemerintah. |
| 2.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. | Sebagaian besar cabang produksi berada di tangan swasta. | Seluruh bidang perekonomian termasuk semua cabang produksi dikuasai oleh negara. |
| 1. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . | Sebagian besar sumber ekonomi dimiliki oleh individu-individu atau kelompok-kelompok individu. | Semua sumber ekonomi dikuasai oleh negara atas nama rakyat, digunakan untuk kepentingan umum tanpa melihat kepentingan individu. |

Sumber: Tom Gunadi, Sistem Ekonomi menurut Pancasila dan UUD 1945.

1. **PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA**
2. Pelaku-pelaku Ekonomi :
   1. Berdasarkan Kepemilikan Modal / Aset :
      1. BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yaitu :

* + - * + BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
        + BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.
        + BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/ asing di mana negara memiliki saham mayoritas minimal 51%. (Pandji Anoraga, 1995).

Karena BUMN diciptakan oleh undang-undang, diusulkan pemerintah dan disetujui DPR, maka jadilah dia suatu produk politik. Itulah sebabnya dikatakan politik merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari BUMN. Apabila elemen politik sampai ditiadakan maka akan hilanglah relevansi dari keberadaan BUMN itu.

* + 1. SWASTA (BUMS)

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan tiga sektor kegiatan perekonomian, yaitu sektor pemerintah, swsta dan koperasi. Dewasa ini semakin jelas adanya trikotomi bangun usaha di Indonesia, yaitu BUMN, Swasta dan Koperasi. Peran swasta dan cara kerja swasta semakin banyak disorot karena memang ada kecenderungan sektor ini bisa bekerja lebih efisien dari pada sektor negara yang terkekang oleh birokrasi, sedangkan koperasi karena masih lemah belum mampu mengembangkan diri (Mubyarto, 1988).

Umumnya dikonsepsikan bahwa tujuan pendirian perusahaan swasta adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal. Dalam zaman modern ini keuntungan maksimal bukan merupakan satu-satunya tujuan masih ada tujuan lain yang leibh penting dan kadang-kadang lebih mendesak misalnya pertumbuhan skala organisasinya, kepentingan sosial dan sebagainya. Pengusaha yang berpandangan jauh ke depan sangat mementingkan “*goodwill*” dari masyarkaat (Sudarono, 1983).

* + 1. KOPERASI

Koperasi dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Menurut undang-undang koperasi yang lama (Undang-undang Koperasi No. 12 Tahun 1967) didefinisikan: Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

* 1. Berdasarkan Besar-kecilnya modal/ aset :
     1. Perusahaan Besar/Usaha Skala Besar, memiliki pekerja 100 orang lebih.
     2. Perusahaan Menengah/ Usaha Skala Menengah, memiliki pekerja 20 – 99 orang.
     3. Perusahaan Kecil/Usaha Skala Kecil, memiliki pekerja 5 – 19 orang.
     4. Kerajinan Rumah Tangga, memiliki pekerja kurang 5 orang

1. Peranan dan Fungsinya bagi Perekonomian
   * + - Peran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
       - Peran sebagai pencipta lapangan kerja
       - Fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Analisis Kebijakan yang Relevan :

* Kebijakan peningkatan kinerja dan daya saing
* Kebijakan pemberdayaan perusahaan kecil menengah
* Kebijakan pembinaan kemitraan usaha

1. Peran BUMN, BUMS sepanjang Sejarah Perekonomian Indonesia :
2. Peran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi

Sampai awal tahun 1980-an BUMN memegang peranan penting. Sejak akhir tahun 1980-an BUMS yang pegang peranan penting. BUMN dan BUMS skala besar memiliki modal besar.

1. Peran sebagai Pencipta lapangan kerja

BUMS terutama yang berskala Usaha Skala Menengah dan Usaha Skala Kecil (UKM, UMKM) karena jumlahnya yang besar tersebar diseluruh Indonesia, bersifat padat karya.

1. Peran sebagai menjaga kelestarian alam/ lingkungan

BUMN, karena milik negara, kepanjangan tangan pemerintah sehingga bisa menjalankan semua kebijakan pemerintah sesuai UU lingkungan hidup.

1. Perbedaan Sifat BUMN, BUMS dan Koperasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Perihal | **BUMN** | **BUMS** | **Koperasi** |
| a. Pendiriannya | Pemerintah + DPR dengan undang-undang | Pemilik modal swasta | Para anggota yang setuju |
| b. Modal | Dari negara | Dari pemilik modal perorangan | Dari simpanan para anggota |
| c. Daya Tahan | Tergantung keuangan negara | Tergantung perkembangan pasar | Partisipasi anggota dan kejujuran pengurus |
| d. Kecenderungan | Etatisme, socialism | Individualisme, kapitalisme | Bersifat campuran/ kolektivisme+ individualisme |

**Latihan Soal**

**Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi dan unsur-unsur dari sistem ekonomi?**

**Bagaimana perkembangan sistem ekonomi di Indonesia? Mengapa terjadi pergeseran dalam melaksanakan sistem ekonomi di Indonesia?**

**Dalam suatu negara sering dikatakan bahwa sistem ekonomi berkaitan erat dengan sistem politik yang dianut oleh negara tersebut. Berikan penjelasan dan berikan contohnya!**

**Siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi di Indonesia dan apa peran dari masing-masing pelaku ekonomi tersebut?**

**BAB 2**

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA**

**Standar Kompetensi :**

Memahamidan mampu menganalisis strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi.

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa mampu menganalisis strategi pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

**A. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI**

Strategi Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*)

Indonesia menganut strategi pertumbuhan ekonomi dan dalam melaksanakan pembangunan memakai Model Harrod Domar. Menurut model ini, setiap penambahan stock kapital masyarakat (K) meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output (Qp). di sini Qp menunjukkan output yang potensial bisa dihasilkan dengan stock kapital (kapasitas produksi) yang ada.

* Hubungan K dan Qp : Qp = hK atau 1/h = K/Qp

1/h = *Capital output ratio* (COR)

koefisien ini menunjukkan untuk menghasilkan setiap unit output diperlukan berapa unit kapital.

Karena hubungan antara K dan Qp adalah proposional, maka :

ΔQp : Qp = hΔK atau 1/h = ΔK/ΔQp

1/h = *Incremental capital output ratio* (ICOR)

koefisien ini menunjukkan untuk menghasilkan tambahan setiap unit output diperlukan berapa unit tambahan kapital (investasi)

Konsekuensi strategi pertumbuhan adalah bahwa besar kecilnya laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada naik turunnya tingkat investasi.

Di dalam pemikiran ini pertumbuhan ekonomi menjadi kriteria utama bagi pengukuran keberhasilan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi maka buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah (trickle down effect) atau melalui tindakan koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan. Bahkan tersirat pendapat bahwa ketimpangan atau ketidakmerataan adalah merupakan semacam prasyarat atau kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya pertumbuhan, yaitu melalui proses akumulasi modal oleh lapisan kaya. Strategi ini disebut strategi pertumbuhan.

**Inti dari konsep strategi ini adalah :**

* Strategi pembangunan ekonomi suatu Negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusatkan, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
* Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (*trickle-down-effect*), pendistribusian kembali.
* Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi.
* Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

Pertumbuhan ekonomi harus tetap tinggi, dengan jalan: *triple track strategy*, yakni:

1. Berpihak kepada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
2. Terus mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Pembangunan yang berkeadilan.

Strategi Perkembangan Ekonomi (*Economic Development*)

Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh entrepreuner (wiraswastawan). Inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastawan.

Syarat-syarat terjadinya inovasi (perkembangan ekonomi) :

(a) Harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi (entreprenur) di masyarakat

* + 1. Harus ada lingkungan sosial, politik dan teknologi yang bisa menjadi tempat subur bagi semangat inovasi
    2. Harus ada cadangan atau supplai ide-ide baru secara cukup.
    3. Harus ada sistem prekreditan yang bisa menyediakann dana bagi para entrepreuner.

Ada lima kegiatan yang termasuk inovasi, yaitu :

Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada.

Diperkenalkannya cara produksi baru, mesin baru

Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.

Pembukaan daerah-daerah pasar baru

Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi.

Disini ada perubahan sistem ekonomi sehingga dari waktu ke waktu kegiatan-kegiatan ekonomi berjalan makin efisien,yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada tingkat investasi.

Strategi Pembangunan Berwawasan Nusantara

Wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan hidup bangsa Indonesia adalah pulau atau kepulauan yang terletak di antara samudera pasifik dan atlantik, di antara benua Asutralia dan Asia (Nusantara).

Pembangunan berwawasan nusantara sebenarnya tidak lain adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembangunan berwawasan ruang (ekonomi regonal) tersirat dalam argumentasi Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab daerah miskin kurang mampu berkembang secepat seperti yang terjadi di daerah yang lebih kaya (Suroso, 1994).

Dilihat dari dimensi ekonomi-regional, Indonesia menghadapi dilema dualisme teknologis, yakni perbedaan dan ketimpangann mengenai pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai kawasan dalam batas wilayah satu negara. Dilema teknologis menonjol karena adanya asimetri (ketidakserasian) antara lokasi penduduk dan lokasi sumber alam (Soemitro Djojohadikusumo, 1993).

Menurut Laoede M. Kamaludin, penataan ruang di masa datang sebaiknya tidak hanya mengacu pada daratan, namun juga harus berorientasi pada penataan ruang kemaritiman. Sedikitnya terdapat tiga pendekatan yang dapat dikembangkan :

Pembangunan ekonomi berbasis teknologi tinggi, pusat pendidikan, jasa dan pariwisata. Ini tepat diterapkan di P. Jawa, Bali dan Batam.

Pembangunan ekonomi yang berbasis potensi kelautan. Ini lebih tepat dikembangkan di kawasan timur Indonesia dan kepulauan kecil di Sumatera.

Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya mineral dan tanaman industri dapat dikembangkan di pulau Sumatera (Kompas, 25-5-1999)

Pembangunan berwawasan nusantara adalah penting karena seiring dengan makin berkembangnya dan makin membesarnya jumlah penduduk maka kita perlu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk menggali persediaan bahan mentah dan sumber-sumber energi yang masih tersimpan banyak dalam flora dan fauna di lautan. Dalam waktu mendatang laut akan merupakan ladang utama dalam manusia mencari bahan makanan dan keperluan hidup (Sutjipto, 1995).

Strategi Ketergantungan

Inti dari konsep strategi ketergantungan: Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya padausaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain.

Langkah yang dapat ditempuh diantaranya : meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.

**5) Strategi yang Berwawasan Ruang**

Pada argumentasi Myrdall dan Hirschman terdapat dua istilah yaitu “back-wash effects” dan “spread effects” **.**

**“*Back-wash Effects*”** adalah kurang maju dan kurang mampunya daerah-daerah miskin untuk membangun dengan cepat disebutkan pula oleh terdapatnya beberapa keadaan yang disebut Myrdall.

**“*Spread effects*”** (pengaruh menyebar), tetapi pada umumnya spread-effects yang terjadi adalah jauh lebih lemah dari back-wash effectsnya sehingga secara keseluruhan pembangunan daerah yang lebih kaya akan memperlambat jalnnya pembangunan di daerah miskin.

Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa **Myrdall** tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan **Hirschman**percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

Semua strategi pembangunan bertujuan pada:

* + Perbaikan kualitas hidup
  + Peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa
  + Penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang sesuai dengan harapan
  + Tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga sampai batas maksimal.
    - * 1. **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN**

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tergantung pada tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara. Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan-lah yang mungkin akan dicapai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruang-lah yang akan dipergunakan.

 Perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari perubahan-perubahan di dalam stabilitas atau keseimbangannyan kapasitas perekonomian dalam jangka waktu yang lama. Ada beberapa karakteristik perkembangan ekonomi modern yang ditinjau dari interrelasi, yaitu:

* Tingginya tingkat pengeluaran perkapita dengan meningkatnya produktifitas tenaga kerja yang cepat.
* Tingginya tingkat penghasilan perkapita yang dapat mengubah tingginya tingkat konsumsi perkapita.
* Teknologi yang maju guna merubah structural skala produk dan karakteristik unit usaha ekonomi yang dicapai.

Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan-kemiskinan pada dasarnya dilandasi keinginan, berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin dibatasi. Sementara itu strategi-strategi pembangunan yang lain ternyata sangat sulit mempengaruhi atau memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini.

Strategi pembangunan, seperti telah diuraikan, ternyata malah menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan. Kemerataan itu tidak hanya antargolongan masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju dan daerah terbelakang. Ketimpangan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cenderung hanya diarahkan kelokasi tertentu. Biasanya modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan outputnya berorientasi ke pasar Internasional dan atau kelompok menengah ke atas di dalam negeri. Dalam kebijaksanaan ini ternyata bekerjanya prinsip perkembangan di daerah-daerah yang lebih maju dapat menimbulkan keadaan-keadaan yang akan mendorong perkembangan daerah-daerah yang lebih miskin / *spread effect* (bandingkan dengan prinsip *trickle down effect (*bagaimana sebuah pertumbuhan akan berdampak pada  kemakmuran sebuah negara) lebih lemah dibandingkan dengan bekerjanya *back-wash effect* (proses mengalirnya dana sumber daya dari daerah terbelakang (desa) ke daerah maju (kota)), sehingga strategi penanaman modal itu mengakibatkan makin miskinnya daerah terbelakang, khususnya pemiskinan sumber dayanya. Selain karena kebijaksanaan penanaman modal, ketimpangan antar daerah juga disebabkan karena potensi daerah yang berbeda-beda. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan antar daerah adalah potensi antar daerah yang berbeda, kebijaksanaan penanaman modal yang berat sebelah (urban bias: penanaman modal hanya di sektor yang sangat menguntungkan, biasanya di daerah perkotaan), dan karena adanya ketimpangan antar daerah.

* + - * 1. **STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA**

Sejak awal Repelita I pembangunan perekonomian Indonesia terfokus pada strategi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun **kenyataannya dititikberatkan pada pembangunan politik sehingga hyperinflasi d**an hasilnya tidak memuaskan sebagian besar masyarakat Indonesia karena diakhiri dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kemudian, **Orde baru menggalakkan Repelita yang cukup sukses kala itu.**

Strategi pembangunan dengan pertumbuhan terbukti gagal menyelesaikan persoalan-persoalan dasar pembangunan. Dalam kiprahnya strategi itu justru menciptakan persoalan-persoalan seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan antar pelaku ekonomi. Strategi pembangunan nasional, kelihatannya telah mengalami pergeseran dari strategi yang berorientasi pada pertumbuhan kepada strategi yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Ada 5 strategi pembangunan ekonomi yang dapat dipilih

1. Strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dengan tujuan pokok untuk meningkatkan *Gross National Product*.
2. Strategi pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan sasaran peningkatan dalam kesempatan kerja produktif.
3. Meningkatkan redistribusi pendapatan
4. Strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan dengan tujuan penghapusan kemiskinan
5. Peningkatan kesempatan kerja produktif dan peningkatan GNP kelompok miskin dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*The Basic Necessity Oriented*).

**Dewasa ini strategi pembangunan nasional kita adalah membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.**

**Latihan Soal**

Apa yang dimaksud dengan strategi pertumbuhan ekonomi?

Jelaskan tentang Strategi Pembangunan Berwawasan Nusantara!

Sebut dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi!

Sebut dan jelaskan 5 (lima) strategi pembangunan ekonomi!

**BAB 3**

**PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN**

**STRUKTUR EKONOMI INDONESIA**

**Standar Kompetensi :**

Memahamidan mengetahui pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi.

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa mampu memahami pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi,periode pertumbuhan ekonomi dan faktor penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

**PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI**

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau “teknologi” produksi itu sendiri.

Konsep pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi bisa kita definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Tujuan pembangunan bukan hanya menginginkan adanya perubahan dalam arti peningkatan produk domestik bruto tapi juga adanya perubahan struktur. Perubahan struktur ekonomi berkisar pada segi akumulasi (pengembangan secara kuantitatif dan kualitatif), segi alokasi (pola penggunaan), segi institusional (kelembagaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat), segi distribusi (pola pembagian pendapatan nasional).

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara serta pembangunan nasional yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat diukur (dilihat) secara kuantitatif, seperti dengan melihat pada pertumbuhan pendapatan nasional dan pertumbuhan penduduk negara tersebut. Sedangkan secara kualitatif dapat dilihat dari perubahan struktur ekonomi negara tersebut dan kemampuan negara tersebut untuk melakukan ekspansi ke negara-negara lain, baik melalui pengaruh politiknya maupun melalui pengaruh ekonomi.

Pendapatan Nasional dalam arti sempit adalah pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan dalam arti luas pendapatan nasional merujuk pada produk domestik bruto, produk nasional bruto atau produk nasional netto. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk.

Seiring dengan laju pertambahan penduduk maka kebutuhan konsumsi harian akan bertambah setiap tahun dan diperlukan tambahan pendapatan tiap tahun (sisi permintaan). Pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan).

Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan menyebabkan peningkatan kemiskinan.

Pada dasarnya struktur ekonomi adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari sistem-sistem ekonomi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan (mewujudkan) kesejahteraan masyarakat suatu negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional. Maka disini akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.

Struktur ekonomi dapat dilihat dari empat sudut tinjauan:

*Struktur ekonomi dari tinjauan makro-sektoral*

Tinjauan ini memandang bahwa perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris (*agricultural*), industri (*industrial*), atau niaga (*commercial*). Hal ini tergantung pada sektor apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkutan.

*Struktur ekonomi dari tinjauan keruangan*

Ditinjau dari sudut pandang keruangan (*spasial*), struktur perekonomian telah bergeser dari berstruktur pedesaan (tradisional) menjadi berstruktur perkotaan (modern).

*Struktur ekonomi dari tinjauan penyelenggaraan kenegaraan*

Ditinjau dari sudut pandang tinjauan ini bahwa struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi struktur *etatis, egaliter,* atau *borjuis*. Predikat ini tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan, yaitu bisa pemerintah/negara, bisa rakyat kebanyakan, atau kalangan pemodal dan usahawan (kapitalis)

*Struktur ekonomi dari tinjauan birokrasi pengambilan keputusan*

Dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi struktur ekonomi yang terpusat (*sentralistis*) dan desentralisasi (*desentralisistis*).

Teori perubahan struktur ekonomi menitikberatkan pada mekanisme transformasi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang yang semula bersifat subsistem dan menitikberatkan pada sektor tradisional menuju ke sektor yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri jasa.

Perubahan struktur ekonomi, secara umum disebut sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposisi *agregat demand* (AD), ekspor-impor (X-M), *agregat supplay* (AS) yang merupakan produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perubahan struktur ekonomi berhubungan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan nilai tambah (NT) dari semua sektor ekonomi. Secara umum dalam proses pembangunan terjadi transformasi ekonomi, dimana pangsa PDB dari sektor industri meningkat dan sektor pertanian mengalami penurunan.

Chenery dalam Tambunan (2003) juga mengatakan bahwa proses transformasi struktural akan mencapai tarafnya yang paling cepat bila pergeseran pola permintaan domestik ke arah output industri manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam komposisi perdagangan luar negeri atau ekspor sebagaimana yang terjadi di kelompok negara-negara industri baru seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong.

**PERIODE PERTUMBUHAN EKONOMI**

1. Masa Orde Lama (1945-1966)

Pada masa ini, perekonomian berkembang kurang menggembirakan, sebagai dampak ketidakstabilan kehidupan politik dan seringnya pergantian kabinet. Pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan dengan laju pertumbuhan 6,9% pada periode 1952-1958, turun drastis menjadi hanya 1,9% dalam periode 1960-1965. Sementara itu, defisit anggaran belanja pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Defisit anggaran tersebut dibiayai dengan pencetakan uang baru, sehingga tingkat harga terus membumbung dan mencapai puncaknya pada tahun 1966.

Perilaku kenaikan harga secara agresif sudah terlihat pada tahun 1955, ketika itu laju inflasi naik 33% (diukur dengan indeks biaya hidup di Jakarta). Besaran mencapai angka 40% pada tahun 1958, dimana laju inflasi rata-rata 223,5% selama periode 1955-1960. Pada tahun 1961 laju inflasi terus meningkat dan bahkan pada akhir kekuasaan orde lama laju inflasi mencapai 650%.

* + 1. Masa Orde Baru (1966-1997)

Pada masa peralihan dari orde lama ke orde baru, ditandai dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu, antara lain:

a. Ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri + US $ 2 miliar;

* 1. Penerimaan devisa ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor barang dan jasa;
  2. Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak;
  3. Percepatan laju inflasi mencapai 30-40% per bulan;
  4. Buruknya kondisi prasarana perekonomian serta penurunan kapasitas produksi sektor industri dan ekspor.

Menghadapi keadaan perekonomian yang sedemikian rupa, pemerintah peralihan menetapkan beberapa langkah prioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut:

* 1. Memerangi inflasi;
  2. Mencukupkan stock cadangan bahan pangan (terutama beras);
  3. Merehabilitasi prasarana perekonomian;
  4. Meningkatkan ekspor;
  5. Menyediakan/menciptakan lapangan kerja;
  6. Mengundang kembali investor asing.

Secara keseluruhan program ekonomi pemerintah orde baru dibagi menjadi dua jangka waktu yang saling berkaitan, yaitu program jangka pendek dan program jangka panjang. Program ekonomi jangka pendek meliputi:

1. Tahap penyelamatan (Juli – Desember 1966);
2. Tahap rehabilitasi (Januari – Juni 1967);
3. Tahap konsolidasi (Juli – Desember 1967)
4. Tahap stabilisasi (Januari – Juni 1968).

Sedangkan program jangka panjang terdiri atas rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai pada bulan April 1969. Tahap pelaksanaan Pelita I (1969/1970) sampai dengan Pelita V (1993/1994) disebut Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama (PJP I). Pelita VI sampai dengan Repelita X disebut Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Kedua (PJP II). Pemerintahan orde baru hanya dapat menyelesaikan sampai tahap pembangunan Pelita VI sedangkan Pelita VII hanya sempat dilaksanakan satu tahun anggaran saja. Hal ini disebabkan terjadinya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan krisis politik, hingga menjadi krisis sosial yang dibarengi dengan semaraknya demonstrasi mahasiswa yang menyebabkan turunnya Presiden Soeharto atau berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru.

Pada masa pemerintahan orde baru pelaksanaan pembangunan senantiasa diarahkan pada pencapaian tiga sasaran pembangunan, meskipun prioritasnya berubah-ubah sesuai dengan masalah dan situasi yang dihadapi pada saat ini. Ketiga sasaran tersebut dikenal dengan sebutan “Trilogi Pembangunan”, yaitu:

* + - 1. Trilogi Pembangunan pada Pelita I (1969-1974), meliputi:
      2. Stabilitas perekonomian
      3. Pertumbuhan ekonomi, dan
      4. Pemerataan hasil-hasil pembangunan
      5. Pada pelita II (1974-1979), meliputi:

Pertumbuhan ekonomi

Pemerataan hasil-hasil pembangunan

Stabilitas perekonomian

* + - 1. Pelita III (1979-1984) hingga Pelita VI (1994-1999):
         1. Pemerataan hasil-hasil pembangunan
         2. Pertumbuhan ekonomi
         3. Stabilitas perekonomian

Pada Pelita VI sebenarnya telah dicanangkan sebagai era pembangunan ekonomi tinggal landas (*take off*) dimana sektor pertanian yang semula memberikan sumbangan terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) digantikan oleh sektor industri pengolahan. Namun industri pengolahan yang dikembangkan adalah industri substitusi impor, dimana kebutuhan akan bahan baku/penolong dipasok dari negara lain (*outward looking*) dan orientasi pemasarannya pada pasar domestik (*inward looking*), sehingga industri pengolahan ini menjadi penghambur devisa, bukan penghasil devisa.

3. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan, namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu rata-rata sekitar 10%.

Pada tahun 1999 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan telah menjadi positif. Ini menunjukkan pertanda pemulihan ekonomi Indonesia. Berdasarkan perhitungan PDB tahun 1993, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1999 adalah sekitar 0,23% dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 0,35%. Untuk meningkatkan kinerja sektor riil, masih memerlukan waktu 3-5 tahun untuk benar-benar tangguh. Namun hal ini diperlukan pendekatan yang komprehensif, karena kalau kita bicara *inefisiensi, high cost*ekonomi, beraarti menyangkut banyak masalah yang berada di instansi yang berbeda-beda. Jadi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus ada koordinasi dan pendekatan konsentrasi antar institusi pemerintah.

**FAKTOR PENENTU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.**

Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas dari input seperti tenaga kerja, modal, teknologi, bahan baku, kewirausahaan dan pertanian serta energi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi:

Faktor Internal

Krisis di Indonesia disebabkan karena buruknya fundamental ekonomi Indonesia.

Perbankan, kebijakan pemerintah menyangkut fiskal dan moneter, serta ekspor.

Situasi dan kondisi politik, sosial dan keamanan serta hukum juga merupakan faktor penting pertumbuhan ekonomi.

Faktor Eksternal

a. Prospek perekonomian dan perdagangan dunia sangat dipengaruhi oleh prospek perekonomian dari AS, Jepang dan masyarakat Eropa.

b. Kondisi politik global seperti misalnya perang AS dan Iraq

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum adalah:

1. Faktor Produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada, dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin;

2. Faktor Investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar;

3. Faktor Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah;

* + - * 1. Faktor Kebijakan Moneter dan Inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus antisipatif dan dapat diterima pasar;
        2. Faktor Keuangan Negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah (tidak defisit).

**Latihan Soal**

Apa yang dimaksud dengan struktur ekonomi? Dan bagaimana terjadinya perubahan struktur ekonomi?

Sebut dan jelaskan sudut tinjauan dari macam struktur ekonomi yang ada!

Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara umum!

**BAB 4**

**KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN**

**Standar Kompetensi :**

Memahami kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep kemiskinan beserta indikator kesenjangan.

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pertumbuhan kesenjangan dan kemiskinan serta cara menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

**KEMISKINAN**

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Masalah kemiskinan yang dihadapi di setiap negara akan selalu dibarengi dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional maupun pembangunan, dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini.

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan (baik antar kelompok berpendapatan, antar daerah perkotaan dan pedesaan, atau antar kawasan dan propinsi) dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia.Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab, selama ini pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat *pro budget*, belum *pro poor*. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi [makro] semata. Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya “*buttom-up intervention*” dengan padat karya atau dengan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha [enterpreneur]. Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal.

Kebutuhan manusia itu bermacam-macam.Hal ini pula yang menjadikan kemiskinan itu bersifat multi dimensional.Kemiskinan memilikibanyak aspek antara lain :

1. Aspek Primer berupa :

- Miskin aset.

- Organisasi sosial politik.

- Pengetahuan dan Keterampilan.

2. Aspek Sekunder berupa :

- Jaringan sosial

- Sumber Keuangan dan Informasi.

Pemahaman Kemiskinan:

* Gambaran kekurangan materi.

Biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

* Gambaran tentang kebutuhan sosial

Termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan. Karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

* Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Penyebab Kemiskinan :

* + Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam(berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomiyang masih rendah.
  + Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atauinternasional antara lain dari segi pendanaan.

Ukuran Kemiskinan

1. Kemiskinan Absolut

Adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dankebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok ataukebutuhan dasar (*basic need*).

Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :

a) Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.

b) Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

2. Kemiskinan Relatif

Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan yakni ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatan.

Kemiskinan relative🡺 proporsi dari tingkat pendapatanrata-rata.

Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpangan antara tingkat hidup orangkaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.Sehingga Bank Dunia (*world bank*) membagi aspek tersebut dalam tiga bagianantara lain :

* + - 1. Jika 40% jumlah penduduk berpendapat rendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasionalnya maka pembagian pembangunan sangat timpang.
      2. Apabila 40% lapisan penduduk berpendapatan rendah menikmati antara 12–17% pendapatan nasional dianggap sedang.
      3. Jika 40 % dari penduduk berpendapatan menengah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional maka dianggap rendah.

3. Kemiskinan Kultural

Berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Teori Perangkap Kemiskinan dari Malthus

Ada tiga kritik utama terhadap teori Malthus dan Neo Malthusian, yaitu :

1. Teori itu tidak memperhitungkan peranan dan dampak dari kemajuanteknologi.

2. Teori itu didasarkan pada suatu hipotesa tentang hubungan secara makro antarapertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan perkapita.

3.Teori itu merupakan perhatian kepada variabel yang keliru yaitu pendapatanperkapita sebagai faktor penentu utama tingkat pertumbuhan penduduk

*Konsep Dualisme*

Unsur pokokkonsep dualisme yaitu :

Dua keadaan bersifat superior dan keadaan bersifat inferior yang bisa hidupberdampingan pada ruang dan waktu yang sama.

Kenyataan hidup berdampingannya dua keadaan yang berbeda bersifat

kronis dan bukan tradisional.

3. Derajat superioritas dan inferioritas tidak menunjukkan kecenderungan yangmenurun, bahkan terus meningkat.

Dualisme dibedakan menjadi:

1. Dualisme sosial

Penemuan seorang ekonom Belanda JH. Boeke, tentang sebab-sebabkegagalan dari kebijaksanaan dalam upaya memperbaiki tingkatkesejahteraan masyarakat.

2. Dualisme ekologis

Konsep ini dikenalkan oleh Clifford Geertz tahun 1963 yang menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi yang membentuk keseimbangan internal.

3. Dualisme teknologi

Benjamin Higgins (1956) mempertanyakan kesahihan dan observasi yang

lebih khusus kegunaan kerangka analisis ekonomi barat yang dikemukakan oleh Boeke. Sedangkan Higgins menemukan bahwa asal muladualisme adalah perbedaan teknologi antara sektor modern dan sektortradisional.

4. Dualisme finansial

Hla Myint (1967) meneruskan studi Higgins tentang peranan pasar modal

dalam proses terjadinya dualisme. Pengertian dualisme financialmenunjukkan bahwa pasar uang dapat dipisahkan ke dalam 2 kelompokyaitu pasar uang yang terorganisir dengan baik (*organized money market*)dan pasar uang yang tidak terorganisir (*unorganized money market*).

5. Dualisme Regional

Dualisme Regional ada dua jenis yaitu :

* + Dualisme antar daerah perkotaan dan pedesaan.
  + Dualisme antar pusat negara, pusat industri dan perdangangan dengandaerah-daerah lainnya dalam negara tersebut.

*Pengaruh Dualisme Terhadap Pembangunan*

* + Mekanisme pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
  + Sumberdaya yang tidak digunakan secara efesien.
  + Mempersulit proses perkembangan kesempatan kerja.
  + Menambah kerumitan masalah pengangguran.

**FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsungmaupun tidak langsung :

* Tingkat kemiskinan cukup banyak.
* Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas tenaga kerja).
* Tingkat inflasi.
* Tingkat Investasi.
* Alokasi serta kualitas sumber daya alam.
* Tingkat dan jenis pendidikan.
* Etos kerja dan motivasi pekerja.

Sektor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia ada tiga faktorpenyebab utama antara lain :

Tingkat produktivitas yang rendah disebabkan oleh jumlah pekerja disektortersebut terlalu banyak, sedangkan tanah, kapital, dan teknologi terbatas sertatingkat pendidikan petani yang rata-ratanya sangat rendah.

Daya saing petani atau dasar tukar domestik (*term of trade*) komoditi pertanianterhadap output industri semakin lemah.

Tingkat diversifikasi usaha disektor pertanian ke jenis-jenis komoditi nonfoodyang memiliki prospek pasar (terutama ekspor) dan harga yang lebih baikmasih sangat terbatas.

**PERSOALAN KEMISKINAN**

Langkah berikut adalah mencari solusi yang relevan untuk memecahkan problemitu (strategi mengentaskan kelompok miskin dari lembah kemiskinan).

**1. Konsep Kemiskinan**

Paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan antara lain :

a. Kemiskinan absolut.

b. Kemiskinan relatif.

c. Kemiskinan subyektif.

**2. Dimensi Kemiskinan**

Sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekatimasalah kemiskinan antara lain :

a. Perspektif kultural (*cultural perspective*).

b. Perspektif struktural atau situasional (*situational perspective*).

Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis, yaitu: individual, keluarga, dan masyarakat.

**DAMPAK KEMISKINAN**

1. **Pengangguran**.

Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup “fantastis” mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat itu. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.

1. **Kekerasan**.

Kekerasan merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu (dengan cara mengintimidasi orang lain).

1. **Pendidikan**.

Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Kehidupan mereka lebih terfokus kepada bagaimana cara untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dirasa sulit. Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Akibat biaya pendidikan yang tinggi maka banyak sekali yang putus sekolah. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.

1. **Kesehatan**.

Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.

1. **Konflik sosial bernuansa SARA**.

Konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan. M.Yudhi Haryono menyebutkan bahwa akibat ketiadaan jaminan keadilan, “keamanan” dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

* Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang- barang dan pelayanan dasar.
* Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
* Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

**INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN**

1. **Indikator kesenjangan**

Kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu.

Cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan:

Kurva Lorenz

Menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan penduduk, secara kumulatif pula.

Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase komulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase komulatif penduduk. Kurvanya sendiri “ditempatkan” pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk.

**Komulatif %**

**Pendapatan Nasional**

***Kurva Lorenz***

***Komulatif % Penduduk***

**Komulatif % Jumlah Penduduk**

Koefisien Gini.

Adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi.

Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.

Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.

1. **Indikator kemiskinan**

|  |
| --- |
| Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dengan kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu:  Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*)  Pendekatan ini sering digunakan dalam metode BPS. Kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.  Pendekatan *Head Count Index*.  Merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan non makanan (*non food line*). |

**PERTUMBUHAN KESENJANGAN DAN KEMISKINAN**

Masalah kependudukan adalah masalah pertumbuhan jumlahpenduduk yang sangat tinggi dan biasanya menimbulkan masalah antara lain :

a. Struktur usia muda.

b. Jumlah pengangguran yang semakin serius.

c. Urbanisasi.

Ada 3 ciri pokok yang menandai perkembangan dan permasalahankependudukan di Indonesia antara lain :

1. Laju pertumbuhan penduduk yang masih perlu diturunkan.

2. Penyebaran penduduk antara daerah yang tidak seimbang.

3. Kualitas kehidupan penduduk yang perlu ditingkatkan.

Data 1970-1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi.

Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan simiskin. Semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga.

Dalam hipotesis Kuznets disebutkan bahwa ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

Dengan data *cross sectional* (antara negara) dan *time series*, Simon Kuznets menemukan bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik.

Tingkat Kesenjangan

Periode

Tingkat Pendapatan Per Kapita

Hasil ini menginterpretasikan:

Evolusi distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan (ekonomi industri). Pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi dan akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun karena sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja dari desa atau produksi atau penciptaan pendapatan dari pertanian lebih kecil.

Hubungan Pertumbuhan dan Kemiskinan.

Hipotesis Kuznets: Pada tahap awal pembangunan tingkat kemiskinan meningkat dan pada tahap akhir pembangunan tingkat kemiskinan menurun.

Faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan:

1. Pertumbuhan
2. Tingkat pendidikan
3. Struktur ekonomi

Untuk mengukur pengaruh pertumbuhan sektoral terhadap tingkat kemiskinan digunakan:

Ln P= a + b1 Ln Y1 + b2 Ln Y2 + b3 Ln Y3 + u + R

Dimana:

P : Fraksi dari jumlah populasi dengan pengeluaran konsumsi dibawah pengeluaran minimum yang telah ditetapkan sebelumnya (garis kemiskinan)

Y:Tingkat output per kapita untuk sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa

u dan R:term kesalahan

Ada korelasi yang negative antara tingkat pendapatan dan kemiskinan (semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, semakin rendah tingkat kemiskinan).

**KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antarakelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakatberpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyaknegara berkembang, tidak terkecuali Indanesia.Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa setelah10 tahun berlalu pada tahun1969, ternyata efek yang dimaksud itu mungkin tidak tepat untuk dikatakan samasekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya,sebagai akibat dari strategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonesia memang menikmati laju pertumbuhanekonomi atau produk domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjanganjuga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.Sebenarnya, menjelang akhir dekade 1970-an pemerintah sudah mulaimenyadari keadaan tersebut yang menunjukkan buruknya kualitas pembangunan yangtelah dilakukan hingga saat itu. Oleh karena itu, strategi pembangunan mulai diubah,tidak hanya pertumbuhan tetapi juga kesejahteraan masyarakat, juga menjadi sasaranutama dari pembangunan.Perhatianmulai diberikan pada usaha–usaha untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya denganmengembangkan industri–industri yang padat karya dan sektor pertanian.

Banyak program yang dilakukanoleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi (kalau tidak bisa menghilangkan)jumlah orang miskin dan perbedaan pendapatan antara kelompok miskin dankelompok kaya di tanah air, misalnya inpres desa tertinggal (IDT), pengembanganindustri kecil dan rumah tangga, khususnya di daerah pedesaan, transmigrasi, danmasih banyak lagi.Krisis ini yang akhirnya menciptakan suatu resesi ekonomi yang besar dengansendirinya memperbesar tinggat kemiskinan dan gap dalam distribusi pendapatan ditanah air, bahkan menjadi jauh lebih parah dengan kondisi pada dekade 1980-an.

Peningkatan pendapatan ternyata belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan karena peningkatan itu mungkin saja hanya terjadi pada golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi, dan tidak terjadi pada golongan masyarakat berpendapatan rendah. Pemerataan pendapatan atau distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau tidaknya pembagian hasil pembangunan suatu negara, baik antarlapisan masyarakat, daerah wilayah maupun antarsektoral.

Ada tiga masalah dalam distribusi pendapatan yang mengakibatkan kesenjangan pendapatan, yaitu:

(a) Pembagian pendapatan antarlapisan pendapatan masyarakat

(b)Pembagian pendapatan antardaerah, yaitu antarwilayah perkotaan dan antarpedesaan, dan

(c) Pembagian pendapatan antarwilayah, yaitu antar-Provinsi dan antarkawasan Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur.

Masalah distribusi pendapatan menyangkut kemiskinan, baik kemiskinan absolut maupun ketimpangan relatif. Distribusi pendapatan dan kemiskinan hendaknya dilihat dalam kerangka acuan suatu analisis, bersamaan dan berkaitan dengan proses akumulasi dan alokasi. Dengan kata lain, akumulasi, alokasi dan distribusi harus dilihat dalam saling keterkaitannya dan dalam kerangka acuan yang mencakup dinamika dalam proses transformasi secara menyeluruh selama masa transisi.

**E. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

Pemerintah memiliki 3 hambatan dalam menghapus kemiskinan:

1. Bagaimana mengelola SDA dan SDM, termasuk birokrasi
2. Bagaimana pembangunan infrastruktur bisa dipercepat.
3. Bagimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

Empat (4) elemen untuk menghapus kemiskinan :

1. Ekonomi harus kuat
2. Keunggulan komparatif jangka panjang
3. Kelembagaan dan pemerintahan yang kuat dan efektif
4. Program bagi kaum miskin yang dirancang dengan seksama

**Kebijakan Anti kemiskinan.**

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan adalah sebagai berikut:

**Kebijakan**

**Kelembagaan**

**Pertumbuhan Ekonomi**

**Pertumbuhan Prokemiskinan**

**Pertumbuhan Propemerataan**

**Pertumbuhan kemiskinan**

**Strategi Dalam Mengurangi Kemiskinan**

1) Pembangunan Sektor Petanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sektortersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat dipedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekaliteknologi disektor pertanian dan infrastruktur.

* + 1. Pembangunan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yangcukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkankesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembagapendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan olehpemerintah.

* + 1. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat

sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangandan program pengentasan kemiskinan.

Adapun pilar utama dalam strategi pengurangan kemiskinan dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1.      Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pro kemiskinan

2.      Pemerintahan yang baik (*good governance*)

3.      Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu :

1. Intervensi jangka pendek yaitu:

* Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan
* Manajemen lingkungan dan Sumber Daya Alam
* Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan
* Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan
* Peningkatan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)

1. Intervensi jangka menengah dan panjang mencakup:

* Pembangunan dan penguatan sektor swasta
* Kerjasama regional
* Manajemen APBN dan administrasi
* Desentralisasi
* Pendidikan dan kesehatan
* Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
* Pembagian tanah pertanian yang merata

**Penanggulangan Kemiskinan**

Pemerintah telah mencanangkan dua pokok kebijaksanaan pembangunan yaitu :

1. Mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
2. Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang dikenal dengan delapan jalur pemerataan sebagai berikut. :
3. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan.
4. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita;
5. Pemerataan pembagian pendapatan.
6. Penyebaran pembangunan di seluruh daerah.
7. Kesempatan memperoleh pendidikan.
8. Kesehatan.
9. Pemerataan Kesempatan kerja.
10. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

**Latihan Soal**

1. Jelaskan tentang indikator kemiskinan dan kesenjangan!
2. Ada tiga masalah dalam distribusi pendapatan yang mengakibatkan kesenjangan pendapatan. Jelaskan!
3. Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijaksanaan tidak langsung dan kebijaksanaan langsung. Jelaskan!
4. Apa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan? Jelaskan beserta gambarnya.

**BAB 5**

**PENGANGGURAN DAN INFLASI**

**Standar Kompetensi :**

Memahami dan mampu menganalisis pengangguran dan inflasi.

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis pengangguran dan inflasi, penyebab serta hubungan antara pengangguran dan inflasi

1. **PENGANGGURAN**

Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Jika tingkat pengangguran tinggi, sumber daya terbuang percuma dan tingkat pendapatan masyarakat merosot. Dalam situasi seperti ini kelesuan ekonomi akan berpengaruh pula pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari.

Berbicara mengenai masalah pengangguran, pemerintah mendefinisikan beberapa kegiatan sebagai berikut:

* + - Orang-orang yang punya pekerjaan adalah tergolong bekerja (*employed*). Dalam kelompok ini adalah orang-orang yang melakukan jenis pekerjaan apa saja yang menghasilkan uang, termasuk di dalamnya orang-orang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi sedang tidak bekerja karena sakit, melakukan pemogokan, atau sedang berlibur.
    - Pengangguran (*unemployed*) adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi sedang dalam usaha mencari pekerjaan atau orang-orang yang sedang menunggu untuk kembali bekerja.

Seseorang disebut menganggur jika:

(a) ia tidak bekerja dan telah melakukan upaya-upaya tertentu untuk mendapatkan pekerjaan selama 4 minggu terakhir,

(b) diberhentikan untuk sementara dan sedang menunggu untuk dipanggil kembali bekerja, atau

(c) sedang menunggu untuk melaporkan diri siap bekerja bulan depan. Orang yang tergolong bekerja atau menganggur dikelompokkan ke dalam angkatan kerja (*labor force*).

* + - Orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi tidak bermaksud untuk mencari pekerjaan bukan termasuk angkatan kerja. Di dalamnya termasuk 34 persen dari penduduk dewasa yang sedang sekolah, ibu rumah tangga, seorang pensiunan, tidak mampu bekerja, atau semata-mata tidak bermaksud untuk mencari kerja.
    - Tingkat pengangguran dihitung dari jumlah orang yang menganggur dibagi dengan seluruh angkatan kerja.

Di negara-negara sedang berkembang pengangguran dapat digolongkan ke dalam 3 jenis yaitu:

1. Pengangguran yang kelihatan (*visible underemployment*)

*Visible underemployment* akan timbul apabila jumlah waktu kerja yang sungguh-sungguh digunakan lebih sedikit daripada waktu kerja yang sanggup/disediakan untuk bekerja. Tegasnya, ini merupakan suatu pengangguran. Meskipun beberapa dari pengangguran itu terdapat di sektor-sektor kerajinan dan industri-industri sedang maupun besar, namun cukup penting bagi negara-negara sedang berkembang karena adanya sifat-sifat khas kegiatan sektor pertanian.

1. Pengangguran tak kentara (*invisible underemployment*)

Pengangguran tak kentara terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan dapat ditarik (setelah ada perubahan-perubahan sederhana dalam organisasi atau metode produksi tetapi tanpa suatu tambahan yang besar) ke sektor-sektor/pekerjaan lain tanpa mengurangi output.

1. Pengangguran potensial (*potensial underemployment*)

Pengangguran potensial merupakan suatu perluasan daripada *disguised unemployment*, dalam arti bahwa para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik dari sektor tersebut tanpa mengurangi output; hanya harus dibarengi dengan perubahan-perubahan fundamental dalam metode-metode produksi yang memerlukan pembentukan kapital yang berarti.

**Pengangguran Ditinjau dari Interpretasi Ekonomi**

1. *Pengangguran friksional*

Terjadi karena berpindahnya orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, dan dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lain atau melalui berbagai tingkat siklus kehidupan yang berbeda.

Bahkan jika suatu perekonomian berada pada tingkat di mana tidak ada pengangguran pun (*full employment*), akan selalu terjadi perputaran (*turnover*) karena adanya orang-orang yang baru saja menyelesaikan sekolahnya dan mencari pekerjaan, atau karena perpindahan dari satu kota ke kota lain. Para wanita kemungkinan akan masuk kembali ke barisan pencari kerja setelah mereka melahirkan. Karena mereka yang tergolong ke dalam pengangguran friksional ini sering berpindah dari satu tempat pekerjaan ke pekerjaan lain, atau mencari tempat kerja yang lebih baik, maka mereka ini sering dianggap sebagai penganggur “sukarela”. Mereka masuk dan keluar dari angkatan kerja dan frekwensi yang amat tinggi. Mereka cepat memperoleh pekerjaan dan seringkali berpindah kerja. Rata-rata lamanya mereka menganggur hanya setengah dari golonagn dewasa; sebaliknya, rata-rata lamanya satu jenis pekerjaan adalah 12 kali lebih besar untuk orang-oarang dewasa dibandingkan dengan mereka yang masih berumur belasan tahun. Dalam tahun-tahun terakhir, setengah dari orang yang berumur belasan tahun yang menganggur merupakan “pendatang baru” yang belum pernah bekerja sebelumnya. Semua faktor ini mengungkapkan bahwa penganggur yang berumur belasan tahun ini sebagian besar bersifat friksional; Hal ini berarti bahwa pencarian kerja dan perputaran kerja diperlukan oleh orang-orang muda untuk menyalurkan bakat mereka, serta untuk memperoleh berbagai pengalaman.

1. *Pengangguran struktural*

Menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketidaksesuaian ini terjadi karena permintaan atas satu jenis pekerjaan bertambah sementara pemintaan atas jenis pekerjaan lain menurun, dan penawaran tidak dapat melakukan penyesuaian dengan cepat atas situasi tersebut. Kita sering melihat ketidakseimbangan struktural antara berbagai jenis pekerjaan ataupun daerah, di mana sektor-sektor tertentu bertumbuh sementara yang lain mengalami penurunan.

1. *Pengangguran siklis*

Terjadi apabila permintaan tenaga kerja secara keseluruhan rendah. Apabila total pembelanjaan dan output menurun, maka pengangguran akan meningkat dengan segera di segala bidang. Dalam masa resesi tahun 1982, tingkat pengangguran meningkat di 48 dari 50 negara bagian. Kenaikan tingkat pengangguran ini telah memberikan pertanda bahwa pengangguran ini sebagian besar bersifat siklis.

Tingkat pengangguran friksional dan struktural dapat terjadi meskipun pasar tenaga kerja secara keseluruhan berada dalam tingkat keseimbangan, misalnya ketika tingkat pertukaran (*turnover*) sangat tinggi, atau ketika ketidakseimbangan geografis sangat besar. Pengangguran siklis terjadi apabila jumlah kesempatan kerja menurun sebagai akibat dari terjadinya ketidakseimbangan antara penawaran agregat dan permintaan agregat.

**Memanfaatkan Tenaga-Tenaga yang Menganggur**

Tenaga-tenaga yang menganggur merupakaan persediaan faktor produksi yang dapat dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lain untuk meningkatkan output di negara-negara sedang berkembang. Persediaan tenaga kerja ini jelas lebih banyak terdapat di daerah-daerah yang padat penduduknya.

Masalah pemanfaatan tenaga menganggur adalah menyangkut baik segi penawaran maupun segi permintaan. Untuk memperluas permintaan akan tenaga kerja diperlukan adanya pengorganisasian tenaga kerja seperti halnya dengan kapital. Pembangunan masyarakat desa mungkin merupakan jalan yang baik, karena hanya diperlukan kapital yang relatif tidak besar. Suatu keuntungan penggunaan tenaga-tenaga yang menganggur secara musiman yakni tidak mengurangi tenaga-tenaga yang diperlukan untuk mengadakan panenan maupun penanaman. Industri-industri kecil juga mungkin sekali akan menyerap tenaga-tenaga yang menganggur karena musim atau memang secara kronis. Masalah perluasan penawaran tenaga kerja menimbulkan akibat-akibat yang lebih luas lagi. Kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak tergantung pada kalori yang dimiliki oleh tenaga kerja itu. Sehingga tidak begitu mudah nampaknya untuk menarik tenaga kerja dari sektor pertanian yang kemudian ini akan diikuti oleh penarikan bahan makanan dari sektor pertanian. Ketidaksempurnaan pasar dapat menghambat alokasi sumber-sumber/faktor-faktor produksi secara lebih efisien, jika dalam masyarakat itu terdapat suatu susunan sosial yang kaku, kurang adanya spesialisasi, adanya ketidakstabilan faktor-faktor produksi. Untuk mengatasai masalah tersebut adalah dengan suatu perancangan dan pengelolaan yang baik, serta diadakan survei yang mendalam mengenai kemungkinan-kemungkinan investasi baru yang nantinya akan dapat mengubah sifat-sifat sosial dan kebudayaan.

**Dampak Ekonomis**

Masyarakat sangatlah mendambakan tersedianya banyak lapangan pekerjaan karena keadaan seperti ini berarti dapat dihasilkannya output yang tinggi dan diperolehnya pendapatan yang tinggi pula. Di samping itu, banyak kelompok masyarakat yang menganggap bekerja itu mempunyai nilai tersendiri. Jika angka pengangguran tinggi, maka akan banyak output yang hilang, pendapatan menurun, dan masyarakat menderita batin karena hilangnya rasa harga diri. Pentingnya masalah pengangguran tenaga kerja (kesempatan kerja) dari segi ekonomi dan kerugian besar yang diakibatkan oleh pengangguran merupakan segi-segi masalah yang ditinjau dalam analisis siklus ekonomi.

1. **CIRI PENGANGGURAN DI INDONESIA**

Pengangguran sangatlah melekat terhadap terbatasnya tingkat perekonomian dalam kehidupan pelakunya.

Kurangnya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sehari–harinya ditambah dengan tidak adanyapendapatan yang diperoleh, membuat pengangguran memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

* + - * 1. Melekatnya dengan tindak kriminal (premanisme).Misalnya perampokan, pembegalan, pencurian, dan lain-lain.
        2. Melekatnya dengan larangan perintah agama.Misalnya pelacuran yang dilakukan oleh para wanita disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia yang mengakibatkan mereka harus bekerja dengan jalan yang kurang disegani.
        3. Tidak mampu mencukupi kebutuhannya.
        4. Jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan
        5. Perkembangan inovasi teknologi, informasi, menyebabkan kurangnya penyerapan Sumber Daya Manusia.
        6. Persaingan di era globalisasi membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik IQ maupun EQ.
        7. Malasnya calon pekerja masuk lapangan kerja, karena memilih pekerjaan yang cocok sesuai minat dan besarnya gaji.
        8. Gengsi yang tinggi terhadap pekerjaan yang ditawarkan.
        9. Takut menghadapi  resiko kerja atau usaha takut gagal.

1. **INFLASI**

Secara ekonomi Inflasidiartikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai [mata uang](http://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang) secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah *inflasi* juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan [uang](http://id.wikipedia.org/wiki/Uang) yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

**Mengukur inflasi**

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

* [Indeks harga konsumen](http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_harga_konsumen) (IHK) atau *consumer price index* (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
* [Indeks biaya hidup](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeks_biaya_hidup&action=edit&redlink=1) atau *cost-of-living index* (COLI).
* [Indeks harga produsen](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeks_harga_produsen&action=edit&redlink=1) adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
* [Indeks harga komoditas](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeks_harga_komoditas&action=edit&redlink=1) adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
* [Indeks harga barang-barang modal](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeks_harga_barang-barang_modal&action=edit&redlink=1)
* [Deflator PDB](http://id.wikipedia.org/wiki/Deflator_PDB)/GDP menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah [CPI](http://id.wikipedia.org/wiki/CPI) dan [Deflator](http://id.wikipedia.org/wiki/GDP_Deflator) PDB/GDP.

**Penggolongan Inflasi**

1. Berdasarkan tingkatannya:
2. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun;
3. Inflasi sedang antara 10%—30% setahun;
4. Inflasi berat antara 30%—100% setahun;
5. Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.
6. Berdasarkan sumber/asalnya:
7. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya [pasar](http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar) yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal.
8. inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang [impor](http://id.wikipedia.org/wiki/Impor). Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.
9. Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga:
10. Inflasi tertutup (*Closed Inflation*).

Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu.

1. Inflasi terbuka (*Open Inflation*)

Apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum.

1. Inflasi yang tidak terkendali ([*Hiperinflasi*](http://id.wikipedia.org/wiki/Hiperinflasi))

Apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot.

|  |
| --- |
|  |

**Penyebab Inflasi**

* + 1. *Demand – Pull Inflation* (DPI)

Adalah faktor penyebab inflasi dari sisi permintaan.

Menurut teori moneter ekses permintaan ini disebabkan terlalu banyaknya uang beredar (M1) di masyarakat, sedangkan jumlah barang di pasar sedikit. Peningkatan permintaan agregat domestik bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya oleh moneter perbankandalam bentuk ekspansi kredit atau penurunan suku bunga pinjaman dan deposito. Dengan kata lain, lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral).

* + 1. *Cost Push Inflation* (CPI)/ Inflasi Desakan Biaya

Adalah faktor penyebab inflasi dari sisi penawaran. Terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi,walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan.

Penyebab inflasi ini lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (*Government*) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif),kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain-lain.

Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu :

* + - * + kenaikan harga, misalnya bahan baku
        + kenaikan upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

Selain biaya produksi lainnya, ongkos tenaga kerja juga sering menjadi salah satu penyebab utama CPI, misalnya kenaikan UMR di semua propinsi.

**Dampak Inflasi**

* + - * + Berkurangnya investasi di suatu negara,
        + Mendorong kenaikan suku bunga,
        + Mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif,
        + Kegagalan pelaksanaan pembangunan,
        + Ketidakstabilan ekonomi,
        + Defisit neraca pembayaran, dan
        + Merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan [masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat).

**Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi**

Meningkatnya Kegiatan Ekonomi

Meningkatnya kegiatan ekonomi mendorong peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawran agregat karena adanya kendala struktural perekonmian.

Kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan.

Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

Pengaruh kuat depresiasi nilai tukar rupiah diketahui dari hasil penelitian bank Indonesia, antara lain :

* + - * + Perilaku harga cenderung mudah meningkat karena pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah.
        + Perilaku harga cenderung sulit untuk turun apabila nilai tukar rupiah menguat.

Tingginya ekspektasi inflasi masyarakat

Tingginya inflasi Indeks Harga Konsumen tidak lepas dari pengaruh ekspektasi inflasi oleh produsen dan pedagang serta konsumen.

**Kebijakan/ Tindakan Mengendalikan Inflasi**

Menyerap kelebihan likuiditas

Untuk meredam melemahnya nilai tukar rupiah terhadap inflasi BI berupamenyerap kelebihan likuiditas melalui instrumen operasi pasar terbuka.

Melakukan Sterilisasi Valuta Asing

Bank Indonesia melakukan kebijakan pembatasan transaksi rupiah oleh bukan penduduk.

Mengurangi ekspektasi inflasi yang tinggi

Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi yang rendah pada awal tahun.

**Latihan Soal**

Mengapa jumlah kesempatan kerja yang ada tidak dapat terpenuhi, padahal jumlah pencari kerja jauh lebih besar dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada?

Siapakah yang dimaksud dengan tenaga kerja dan bukan tenaga kerja?

Sebut dan jelaskan penyebab inflasi!

Jelaskan penggolongan inflasi berdasarkan sumber/asalnya!

**BAB 6**

**PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA**

**Standar Kompetensi :**

Memahami dan mengerti pembangunan ekonomi daerah di Indonesia.

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis:

* + - * + Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rata-rata perkapita dan trend pertumbuhannnya.
        + Kontribusi sektoral terhadap PDRB.
        + Faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah.
        + Teori dan model analisis pembangunan ekonomi daerah dan otonomi daerah.

1. **Distribusi PDB nasional, PDRB rata-rata perkapita dan trend pertumbuhannnya.**

Mulai Pelita I hingga krisis pembangunan ekonomi memberikan hasil positif bagi perekonomian Indonesia dari sisi kinerja ekonomi makro. Dari sisi kualitas, proses pembangunan ekonomi selama orde baru meninggalkan kesenjangan yang cukup besar baik dalam hal distribusi pendapatan dan kesenjangan antar daerah/provinsi.

Distribusi PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional menurut provinsi merupakan indikator utama dalam mengukur derajat penyebaran hasil pembangunan ekonomi di suatu negara.

Kenyataan ini dapat ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

* + - * + Menurut data BPS, sebagian besar PDB nasional dari pulau Jawa (Jabar dan DKI Jakarta), menyumbang 60% terhadap pembentukan PDB Indonesia.
        + DKI menikmati 15-16% dari PDB, Jatim 15%, Jateng 10%
        + Aceh menyumbang 3% dari PDB, Riau dan Kaltim 5% (dihitung dengan migas), jika dihitung tanpa migas; Aceh, Riau dan Kaltim hanya menyumbang masing-masing 1,7%, 2,5%, 2,9%.
        + Jakarta tidak punya sumber daya alam namun penyumbang PDB terbesar dibandingkan Aceh, Riau dan Kaltim yang memiliki banyak sumber daya alam. Hal ini disebabkan karena Jakarta memiliki SDM dan infrastruktur jauh lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan Aceh. Riau dan Kaltim.

Berdasarkan PDRB rata-rata perkapita dan trend pertumbuhannnya ada 4 kelompok provinsi di Indonesia berdasarkan PDRB per kapita:

* + - * + *Kelompok I* : PDRB rendah, tingkat pertumbuhan tinggi adalah Kalbar, Jatim, Sumbar, Sumsel, Aceh, Sulut dan NTB.
        + *Kelompok I*I : PDRB dan pertumbuhan tinggi: Jakarta, Kaltim, Kalteng, Bali, Riau, Sumut
        + *Kelompok III* : PDRB tinggi pertumbuhan rendah: Irian Jaya - Freeport
        + *Kelompok IV* : PDRB dan pertumbuhan rendah adalah provinsi-provinsi lainnya.

Pertumbuhan dan kemakmuran daerah dapat dipacu oleh ekonomi nasional/wilayah yang tumbuh pesat:

- Adanya pasar yang lebih besar dan dapat diakses untuk ekspor dan investasi

- Daerah dapat menjadi kawasan yang menarik untuk investasi

- Daerah dapat fokus pada kekuatan uniknya

Ekonomi daerah dapat menurun jika berada dalam ekonomi nasional/wilayah yang tidak berkembang.

1. **Kontribusi sektoral terhadap PDRB**

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Dua kriteria kinerja ekonomi makro yang terkait dengan PDRBialah:

* + - * + laju pertumbuhan ekonomi, dan
        + kontribusi sektor-sektor ekonomi.

Untuk melihat pergeseran kontribusi sektor ekonomi dapat dilakukan dengan mengkaji PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dalam periode waktu tertentu menggunakan analisis terhadap PDRB atas dasar harga konstan. Dalam upaya mengetahui perkembangan ekonomi makro secara dini dan berkesinambungan, maka kajian terhadap PDRB tersebut disusun dalam jangka triwulan pada tahun berjalan.

PDRB adalah merupakan jumlah nilai tambah *(value added)* yang dihasilkan seluruh unit usaha, baik berupa barang maupun jasa, dalam suatu wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada saat penghitungan *(current price),* sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar *(constant price)*.

Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. **Pendekatan produksi** yaitu menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit produksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi sembilan lapangan usaha (sektor ekonomi) yaitu: (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5) bangunan/konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (9) jasa-jasa. Pada setiap sektor ekonomi tersebut selanjutnya dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

1. **Pendekatan pendapatan** yaitu menghitung PDRB dengan menjumlahkan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah (1) upah dan gaji; (2) sewa tanah; (3) bunga modal dan keuntungan. Semua penghitungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

1. **Pendekatan pengeluaran** yaitu menghitung PDRB sebagai penjumlahan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba; (2) pengeluaran konsumsi pemerintah; (3) pembentukan modal tetap domestik bruto; (4) perubahan inventori; dan (5) ekspor neto (nilai ekspor dikurangi nilai impor) pada publik.

Menurut Tambunan bahwa provinsi yang pertumbuhan PDRBnya tinggi adalah provinsi yang didominasi oleh industri manufaktur. Perekonomian di Jawa didominasi oleh sektor industri manufaktur, sedangkan di luar Jawa didominasi oleh pertanian dan pertambangan. Hal ini menunjukkan tidak meratanya industrilisasi di Indonesia.

1. **Faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah.**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincolin Arsyad, 1999).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999).Ketidakseimbangan ekonomi antar daerah harus dapat ditanggulangi dengan peningkatan perhubungan antar pulau dan pelayaran pantai beserta prasarananya.

Secara umum faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah adalah:

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

* Semua kegiatan ekonomi dipusatkan di daerah tertentu saja
* Efek menetes kebawah tidak terjadi atau berjalan dengan lambat

1. Alokasi investasi

* Investasi terpusat di wilayah tertentu saja, sehingga kawasan timur kurang tersentuh.

1. Tingkat mobilitas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) yang rendah antar daerah
2. Perbedaan sumber daya alam antar provinsi
3. Perbedaan kondisi demografis antarwilayah
4. Kurang lancarnya perdagangan antar provinsi

Untuk melihat ketidakmerataan pertumbuhan regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan:

1. Pertumbuhan output;

Digunakan untuk mengetahui indikator kapasitas produksi.

1. Pertumbuhan output per pekerja;

Seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah,

3. Pertumbuhan output perkapita.

Digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan.

Bagi pemerintah pusat, ketidakmerataan antarregion dan ketidakmerataan intraregion bukan merupakan *trade off* yang saling meniadakan. Karena kedua ketidakmerataan regional tersebut merupakan masalah yang harus diselesaikan karena terdapat keterkaitan antar kedua permasalahan tersebut.

1. **Teori dan model analisis pembangunan ekonomi daerah dan otonomi daerah.**

Perbedaan karakteristik wilayah berarti perbedaan potensi yang dimiliki, sehingga membutuhkan perbedaan kebijakan untuk setiap wilayah. Untuk menunjukkan adanya perbedaan potensi ini maka dibentuklah zona-zona pengembangan ekonomi wilayah.Zona Pengembangan Ekonomi Daerah (ZPED)adalah pendekatan pengembangan ekonomi daerah dengan membagi habis wilayah sebuah daerah berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki, dalam satu daerah dapat terdiri dari dua atau lebih zona dan sebuah zona dapat terdiri dari dua atau lebih cluster. Setiap zona diberi nama sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki, demikian pula pemberian nama untuk setiap cluster, misalnya : Zona Pengembangan Sektor Pertanian yang terdiri dari Cluster Bawang Merah, Cluster Semangka, dan sebagainya.

Zona pengembangan ekonomi daerah adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk membangun ekonomi suatu daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pola pembangunan ekonomi dengan pendekatan zona pengembangan ekonomi daerah, bertujuan:

1. Membangun setiap wilayah sesuai potensi yang menjadi keunggulan kompetitifnya/kompetensi intinya.
2. Menciptakan proses pembangunan ekonomi lebih terstruktur, terarah dan berkesinambungan.
3. Memberikan peluang pengembangan wilayah kecamatan dan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan yang umumnya dikembangkan oleh para ahli ekonomi regional dewasa ini. Para ahli sangat concern dengan ide pengembangan ekonomi yang bersifat lokal, sehingga lahirlah berbagai Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development/LED).Strategi ini terangkum dalam berbagai teori dan analisis yang terkait dengan pembangunan ekonomi lokal.

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah:

1. Teori Basis Ekonomi

Permintaan barang dan jasa dari luar daerah sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan penciptaan lapangan kerja di daerah itu.

1. Teori Lokasi

Keinginan pengusaha untuk mencari keuntungan tinggi dengan biaya yang rendah.

1. Teori daya tarik industri

Terkait dengan daya saing, potensi ekspor dan produktivitas.

Model Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah

* Analisis SS (Shift – Share)

Menganalisis kinerja perekonomian suatu daerah dengan daerah yang lebih besar (nasional).

* Location Quotients (LQ)

Mengukur konsentrasi suatu kegiatan ekonomi atau sektor di suatu daerah dengan cara membandingkan peranan perekonomian tersebut dengan peranan sektor yang sama di tingkat nasional.

* Angka Pengganda Pendapatan

Mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu kegiatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah tersebut.

* Analisis Input – Output

Sering digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha memahami kompleksitas perekonomian daerah tersebut serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan Agregat Demand (AD) dan Agregat Supply (AS)

* Model Pertumbuhan Harrod Domar

Suatu relasi jangka pendek antara peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralitas, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.

Karena banyak ketimpangan antar provinsi menyebabkan banyak yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Kemudian muncul dengan apa yang dinamakan otonomi daerah guna meminimalisir disintegrasi bangsa.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

**Latihan Soal**

1. Jelaskan pengertian daerah ditinjau dari aspek ekonomi!
2. Apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi daerah?
3. Bagaimana strategi dalam pembangunan ekonomi daerah?

**BAB 7**

**SEKTOR PERTANIAN**

**Standar Kompetensi :**

Memahami dan mampu menganalisis sektor pertanian di Indonesia.

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis kinerja dan peran sektor pertanian di Indonesia, nilai tukar petani, dan keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor ekonomi lainnya.

**Kinerja dan peran sektor pertanian di Indonesia**

Pembangunan di bidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena sebagian besar rakyat Indonesia mengkonsumsi beras dan bekerja di sektor pertanian. Mengutip pernyataan Gunnar Mirdal dalam Todaro (2004) yang menyatakanbahwa dalam sektor pertanianlah ditentukan berhasil atau tidaknya upaya–upayapembangunan ekonomi jangka panjang. Jika suatu negara menghendakipembangunan yang lancar dan berkesinambungan maka negara itu harus memulainyadari sektor pertanian khususnya. Intisari yang terkandung dalam masalah kemiskinanyang terus meluas, ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin parah,lajupertumbuhan penduduk yang semakin cepat, serta terus melonjaknya tingkatpengangguran pada awalnya tercipta dari stagnasi serta terlalu seringnya kemunduran kehidupan perekonomian di sektor pertanian.

Secara tradisional, peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomihanya dipandang pasif dan sebagai unsur penunjang semata. Berdasarkan pengalamanhistoris dari negara-negara barat, apa yang disebut sebagai pembangunan ekonomiidentik dengan transformasi struktural yang cepat terhadap perekonomian,yakniperekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi industri modern danpelayanan masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian,peran utama pertanianhanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murahdemi berkembangnya sektor-sektor industri yang dinobatkan sebagai “sektorunggulan” dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritaspertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan tiga unsur pelengkap dasar,yakni:

(1) percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaianteknologi, institusional, dan insentif harga yang khusus dirancang untukmeningkatkan produktivitas para petani kecil,

(2) peningkatan permintaan domestikterhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada upaya pembinaan ketenagakerjaan,

(3)diversifikasi kegiatanpembangunan daerah yang bersifat padat karya, yaitu nonpertanian, yang secaralangsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakatpertanian.

Karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian kinidiyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyakpihak. Harus diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan/pertanian yangintegratif, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar, dan kalaupun bisaberjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpanganinternal yang sangat parah dalam perekonomian yang bersangkutan.Pada gilirannya,segenap ketimpangan tersebut akan memperparah masalah-masalahkemiskinan,ketimpangan pendapatan, dan pengangguran (Todaro, 2004).

Menurut Analis klasik dari Kuznets (1964) dalam Tambunan.T (2003), pertanian di Negara-negara Sedang Berkembang (NSB) merupakan suatu sektorekonomi yang sangat potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadappertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, yaitu :

1. Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi nonpertanian sangat bergantung padaproduk-produk dari sektor pertanian, bukan saja untuk kelangsunganpertumbuhan suplai makanan, tetapi juga untuk penyediaan bahan -bahan bakuuntuk keperluan kegiatan produksi di sektor -sektor nonpertanian tersebut,terutama industri pengolahan, seperti industri -industri makanan dan minuman,tekstil dan pakaian jadi, barang-barang dari kulit, dan farmasi. Hal inikemudian disebut sebagai **kontribusi produk**.
2. Karena kuatnya bias agraris dari ekonomi selama bertahap-tahap awalpembangunan, maka populasi di sektor pertanian (daerah pedesaan)membentuk suatu bagian yang sangat besar dari pasar (permintaan) domestikterhadap produk-produk dari industri dan sektor lain di dalam negeri, baikuntuk barang-barang produsen maupun barang-barang konsumen.Yangkemudian disebut sebagai **kontribusi Pasar**
3. Karena relatif pentingnya pertanian (dilihat dari sumbangan output-nyaterhadap pembentukan PDB dan andilnya terhadap penyerapan ternaga kerja)tanpa bisa dihindari menurun dengan pertumbuhan atau semakin tingginyatingkat pembangunan ekonomi, sektor ini dilihat sebagai suatu sumber modaluntuk investasi di dalam ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi melibatkantransfer surplus modal dari sektor pertanian ke sektor-sektor nonpertanian.Hal ini disebut sebagai **kontribusi faktor-faktor produksi.**
4. Sektor pertanian mampu berperan sebagai salah satu sumber penting bagisurplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran (sumber devisa), baiklewat ekspor hasil-hasil pertanian atau peningkatan produksi komoditi -komoditi pertanian menggantikan impor (substitusi impor). Hal ini disebutsebagai **kontribusi devisa**.

Menurut Tambunan. T (2003), kontribusi sektorpertanian di suatu negara terhadap pendapatan devisa adalah lewatpertumbuhan ekspor dan/atau pengurangan impor negara tersebut ataskomoditi-komoditi pertanian. Tentu, kontribusi sektor pertanian terhadapekspor juga bisa bersifat tidak langsung, misalnya lewat peningkatan eksporatau pengurangan impor produk-produk berbasis pertanian, seperti makanandan minuman, tekstil, dan produk – produknya.

**Nilai tukar petani**

Hampir 70% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai petani sehingga pertanian sebagai motor penggerak untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengentaskan kemiskinan.

*Fakta:*

* + - * + Tingkat kesejahteraan petani memburuk, seiring dengan pembangunan ekonomi
        + Posisi tawar petani lemah sekali
        + Kebijakan pemerintah ada, tetapi belum mengena sasaran & tidak intensif.

*Akibat:*

* + - * + Nilai tukar produk pertanian masih rendah
        + Peningkatan pendapatan di sektor pertanian lambat

Tingkat kesejahteraan petani dicerminkan dari kemampuan / daya beli petani yang diukur dan diformulasikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP).

Istilah nilai tukar mempunyai arti yang luas. Nilai tukar adalah nilai tukar suatu barang dengan barang lain. Secara umum, nilai tukar dapat digolongkan dalam 4 kelompok (Tsakok, 1990):

* + - * + Nilai Tukar Barter *(Barter Terms of Trade)*
        + Nilai Tukar Faktorial *(Factorial Terms of Trade)*
        + Nilai Tukar Pendapatan *(Income Terms of Trade)*
        + Nilai Tukar Petani *(Farmers Terms of Trade)*

Nilai Tukar Petani adalah Rasio antara indeks harga yang diterima petani (indeks harga jual output) dengan indeks harga yang dibayar petani (indeks input-input yang digunakan petani, seperti pupuk, dll) dinyatakan dalam persentase (%).

Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) hanya menunjukkan perbedaan antara harga output pertanian dengan input pertanian, bukan barang-barang lain seperti pakaian, sepatu, dan makanan.

Secara umum NTP menghasilkan 3 pengertian:

* + - * + NTP > 100, NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar.
        + NTP = 100, NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar.
        + NTP < 100, NTP pada suatu periode tertentu lebih menurun dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar.

Rumus Nilai Tukar Petani:



Keterangan:

* + - * + NTP = indeks nilai tukar petani
        + IT = indeks harga yang diterima petani
        + IB = indeks harga yang dibayar petani

**Indeks harga yang diterima petani (IT)**adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani.

Indeks harga yang diterima petani (IT)terdiri dari:

* Indeks sektor bahan makanan (TBM)
  + - * + Indeks kelompok padi
        + Indeks kelompok palawija
        + Indeks kelompok sayur-sayuran
        + Indeks kelompok buah-buahan
* Indeks sektor tanaman perkebunan rakyat (TPR)
  + - * + Indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat

**Indeks harga yang dibayar petani (IB)**adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

Indeks harga yang dibayar petani (IB)meliputi:

* Indeks sektor konsumsi rumah tangga (KRT)
  + - * + Indeks kelompok makanan
        + Indeks kelompok perumahan
        + Indeks kelompok pakaian
        + Indeks kelompok aneka barang dan jasa
* Indeks sektor biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM)
  + - * + Indeks kelompok non faktor produksi
        + Indeks kelompok upah
        + Indeks kelompok lainnya
        + Indeks kelompok penambahan barang modal

**Harga yang dibayar petani**adalah rata-rata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi/dibeli petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian.

Harga yang diterima petaniadalah rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum ditambahkan biaya transportasi /pengangkutan dan biaya pengepakan ke dalam harga penjualannya *(farm gate).*

Kelemahan Perhitungan NTP:

* NTP hanya merujuk rumah tangga petani tanaman bahan makanan dan perkebunan rakyat.

NTP tidak dapat dijadikan penciri kondisi ekonomi rumah tangga tani secara umum (termasuk peternak dan rumah tangga perikanan)

* NTP hanya mengakomodir pendapatan rumah tangga tani dari usaha bahan makanan dan perkebunan.

Faktanya rumah tangga tani tanaman bahan makanan dan perkebunan juga memperoleh pendapatan dari usaha peternakan atau perikanan, ataupun usaha non pertanian.

NTP hanya valid bagi rumahtangga tani (spesialis) yang seluruh pendapatannya dari usahatani tanaman.

* NTP yang dihitung sebagai rasio indeks harga seluruh barang yang dijual (hasil usahatani) terhadap indeks harga seluruh barang yang dibeli (barang konsumsi dan input usahatani) rumah tangga tanaman, lebih tepat disebut nilai tukar barter antara rumahtangga petani murni (spesialis) tanaman dengan masyarakat lainnya.

Nilai tukar barter tidak memiliki hubungan langsung & jelas dengan daya beli pendapatan yang merupakan penanda dari kesejahteraan rumah tangga, yang didefinisikan sebagai rasio pendapatan (laba usahatani) terhadap indeks harga barang konsumsi yang dibeli rumah tangga.

Solusi Terhadap Kelemahan Perhitungan NTP:

Penggunaan NTP juga disertai dengan dua ukuran nilai tukar petani, yaitu:

* + - * + Nilai tukar konsumsi petani (NTKP)
        + Rasio dari indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga konsumsi petani.
        + Menunjukkan daya beli setiap unit hasil usaha tani atas barang konsumsi rumahtangga tani.
        + NTKP, *ceteris paribus,* berpengaruh positif terhadap dayabeli hasil usahatani (=kesejahteraan ekonomi petani)
        + Nilai Tukar Faktor Produksi Usahatani (NTFP)
        + Rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga input usahatani.
        + Menunjukkan insentif berusahani.
        + NTFP, *ceteris paribus,* berpengaruh positif terhadap produksi dan laba usahatani (= kesejahteraan ekonomi petani).

**Keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor ekonomi lainnya.**

Keterkaitan dalam Sektor Pertanian

Kemampuan sektor pertanian sebagai lokomotif penarik pertumbuhan outputdi sektor-sektor ekonomi lainnya tidak hanya melalui keterkaitan produksi sepertidalam pandangan Hirschman, tetapi juga melalui keterkaitan konsumsi ataupendapatan dan pada banyak kasus juga melalui keterkaitan investasi. Dalam bentuk -bentuk keterkaitan ekonomi tersebut, sektor pertanian mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai sumber investasi di sektor -sektor non-pertanian : surplus uang (MS)di sektor pertanian menjadi sumber dana investasi di sektor - sektor lain.
2. Sebagai sumber bahan baku atau input bagi sektor-sektor lainnya, khususnyaagroindustri dan sektor perdagangan.
3. Melalui peningkatan permintaan di pasaroutput, sebagai sumber diversifikasi produksi di sektor-sektor ekonomi lainnya.(Tambunan. T, 2003),

Keterkaitan produksi menunjukkanketergantungan dalam proses produk di antara satu sektor dengan sektor-sektorlain.

**Latihan Soal**

Mengapa sektor pertanian mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia?

Jelaskan perbedaan antara nilai tukar petani dengan harga yang dibayar petani!

Indonesia adalah negara agraris, tetapi sampai saat ini belum dapat mewujudkan swasembada pangan. Bagaimana pendapat anda tentang hal ini!

**BAB 8**

**INDUSTRIALISASI**

**Standar Kompetensi :**

Memahami dan mampu menganalisis industrialisasi.

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis konsep dan tujuan industrialisasi, faktor pendorong industrialisasi dan perkembangan sektor industri manufaktur nasional serta permasalahandan strategi pembangunan sektor industri.

**Industrialisasi**

Industrilisasi secara ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Secara umum Industrialisasi adalah proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasispesialisasi produksi dan perdagangan antar negara.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan mendorong perubahan dari basis pertanian ke industri, Dengan merujuk kepada keberhasilan negara di Eropa dalam industrialisasi, maka banyak negara-negara yang belum maju mencoba menggunakan model yang diterapkan pada negara-negara maju tersebut.

Dengan sentuhan teknologi berarti ada perbaikan cara berproduksi, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Peningkatan produktivitas dan efisiensi menyebabkan keuntungan meningkat, karena rentabilitas meningkat berarti ada investasi baru dan penyerapan tenaga kerja. Apabila hal ini terjadi dengan baik maka GDP dan GNP meningkat, yang berarti terjadi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan.

Empat argumentasi kebijakan industrialisasi berbasis teori:

1. Keunggulan komparatif

Negara-negara yang menganut basis teori keunggulan komparatif (*comparatif advantage*) akan mengembangkan sub sektor atau jenis-jenis industri yang memiliki keunggulan komparatif baginya.

1. Keterkaitan industrial

Negara-negara yang bertolak dari keterkaitan industrial (*industrial linkage*) akan lebih mengutamakan pengembangan bidang-bidang industri yang paling luas mengait pengembangan bidang-bidang kegiatan atau sektor-sektor ekonomi lain.

1. Penciptaan kesempatan kerja

Negara-negara yang industrialisasinya dilandasi argumentasi penciptaan lapangan kerja (*employment creator*) maka negara tersebut akan lebih memprioritaskan pada pengembangan industri-industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Jenis industri yang dimajukan bertumpu pada industri-industri padat karya dan industri-industri kecil.

1. Loncatan teknologi

Negara-negara yang menganut argumentasi loncatan teknologi (*teknology jump*) percaya bahwa industri-industri yang menggunakan teknologi tinggi (*hi-tech*) akan memberikan nilai tambah yang sangat besar, diiringi dengan kemajuan bagi teknologi pada berbagai sektor industri dan sektor-sektor lainnya.

Industrialisasi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, melainkan hanya salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dan berkelanjutan.meskipun pelaksanaan sangat bervariasi antarnegara, periode industrialisasi merupakan tahapan logis dalam proses perubahan struktur ekonomi. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam pembentukan PDB, permintaan konsumen, ekspor dan kesempatan kerja.

**Faktor pendorong industrialisasi**

1. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri.

Suatu Negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri-industri primer atau hulu seperti besi dan baja, semen, petrokimia, dan industri-industri tengah(Antara hulu dan hilir), seperti industri barang modal(mesin) dan alat-alat produksi yang relatif kuatakan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat dibandingkan Negara yang hanya memiliki industri-industri hilir atau ringan.

1. Besarnya pasar dalam negeri.

Pasar dalam negeri yang besar, seperti Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang merupakan salah satu faktor perangsang bagi pertumbuhan kegiatan-kegaiatan ekonomi, termasuk industri, karena pasar yang besar menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi(dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lainnya mendukung). Jika pasar domestik kecil, maka ekspor merupakan alternatif satu” nya untuk mencapai produksi optimal.

1. Ciri industrialisasi

Yang dimaksud disini adalah antara lain cara pelaksanaan industrialisasi, seperti misalnya tahapan dari dari implementasi, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan sektor industri, dan insentif yang diberikan, termasuk insentif kepada investor.

1. Keberadaan Sumber Daya Alam

Ada kecenderungan bahwa Negara-negara yang kaya SDA, tingkat diversifikasi dan laju pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah, dan negara tersebut cenderung tidak atau terlambat melakukan industrialisasi atau prosesnya berjalan relatif lebih lambat dibandingkan Negara-negara yang miskin SDA.

1. Kebijakan pemerintah

Pola industrialisasi di negara yang menerapkan kebijakan subtitusi impor dan kebijakan perdagangan luar negeri yang protektif(seperti Indonesia terutama selama pemerintahan Orde Baru hingga krisis terjadi) berbeda dengan di negara yang menerapkan kebijakan promosi ekspor dalam mendukung industrinya.

Faktor penghambat yaitu :

* + - * 1. Suasana industri belum merata
        2. Tenaga terampil yang masih harus diperbanyak dan diserasikan lagi.
        3. Daya beli masyarakat yang masih rendah
        4. Modal yang tersedia masih terbatas.
        5. Pasaran yang belum merata dikarenakan kondisi Indonesia yang bersifat kepulauan sehingga distribusi belum merata dengan baik

**Perkembangan sektor industri manufaktur nasional**

Industri diklasifikasikan:

1. Industri primer/hulu yaitu mengolah output dari sektor pertambangan (bahan mentah) menjadi bahan baku siap pakai untuk kebutuhan proses produksi pada tahap selanjutnya.
2. Industri sekunder/manufaktur yang mencakup: industri pembuat modal (mesin), barang setengah jadi dan alat produksi, dan industri hilir yang memproduksi produk konsumsi (siap dijual).

*Pertumbuhan output*

* Sebelum krisis, di Asia Timur dan Tenggara, industri manufaktur adalah kontributor utama pertumbuhan ekonomi.
* Indonesia terlambat dalam melakukan proses industrialisasi, namun pertumbuhannya pesat dalam tahun 1990-an dengan memiliki pertumbuhan output yang tinggi.
* Yang paling menonjol adalah Singapura.
* Terjadi pergeseran dari pasar domestik ke global.
* Indonesia pada tahun 1972 – 1999 pertumbuhan output dari industri manufaktur lebih tinggi daripada pertanian maupun output nasional dari semua sektor (PDB)
* Namun pada saat krisis, tidak terlalu berdampak pada sektor pertanian. Karena tingkat ketergantungan pada impor barang yang tinggi.

Tingkat perkembangan industri manufaktur dapat dilihat dari pendalaman struktur industri itu sendiri. Struktur industri:

1. Ragam produk 🡺 barang konsumsi, sederhana,barang konsumsi dengan kandunganteknologi yanglebih canggih, barang modal.

2. Intensitas pemakaain faktor produksi🡺 barang dengan padat karya dan barang dengan padat modal

3. Orientasi pasar 🡺 barang domestik & barang ekspor

Pendalaman Struktur Industri

Pembangunan ekonomi jangka panjang dapat merubah pusat kekuatan ekonomi dari pertanian menuju industri dan menggeser struktur industri yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

Perubahan struktur industri disebabkan oleh:

1. Penawaran aggregat🡺 perkembangan teknologi, kualitas SDM, inovasi material baru untuk produksi
2. Permintaan aggregat🡺peningkatan pendapatan perkapita yang mengubah volume dan pola konsumsi

Berdasarkan analisis tingkat pendalaman struktur industri:

* Orientasi perkembangan industri manuafktur di Indonesia masih pada barang konsumsi sederhana seperti makanan, minuman pakaian jadi sampai bambu, rotan dan kayu.
* Sisi permintaan agregat, pasar domestik barang konsumsi berkembang pesat seiring laju penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita.
* Sisi penawaran aggregat, Sarana dan prasarana menunjang untuk produksi barang konsumsi tersebut dibandingkan barang modal.
* Aspek teknolgi, kandungan teknologi barang konsumsi lebih rendah.

**Permasalahandan strategi pembangunan sektor industri.**

Permasalahan dalam Industrilisasi:

**Total faktor produksi rendah (Produktivitas faktor produksi secara parsial maupun total rendah)**

1. Keterbatasan teknologi

2. Kualitas Sumber daya Manusia

3. Keterbatasan dana pemerintah (selalu difisit) dan sektor swasta

4. Kerja sama antara pemerintah, industri dan lembaga pendidikan dan penelitianmasih rendah

Masalah dalam industri manufaktur nasional:

1. Kelemahan struktural

* Basis ekspor dan pasar masih sempit, walaupun Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam dan Tenaga Kerja, tapi produk dan pasarnya masih terkonsentrasi:

a. terbatas pada empat produk (kayu lapis, pakaian jadi, tekstil danalas kaki).

b. Pasar tekstil dan pakaian jadi terbatas pada beberapa negara: USA, Kanada, Turki dan Norwegia.

c. USA, Jepang dan Singapura mengimpor 50% dari total ekspor tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia

d. Produk penyumbang 80% dari ekspor manufaktur indonesia masih mudahterpengaruh oleh perubahan permintaan produk di pasar trbatas.

e. Banyak produk manufaktur terpilih padat karya mengalami penurunan

harga muncul pesaing baru seperti cina dan vietman

* + - * 1. Produk manufaktur tradisional menurun daya saingnya sebagai akibat faktor internal seperti tuntutan kenaikan upah
* Ketergantungan impor sangat tinggi

Tahun 1990, Indonesia menarik banyak Penanaman Modal Asing untuk industri berteknologi tinggi seperti kimia, elektronik, otomotif, dan sebagainya, tapi masih proses penggabungan, pengepakan dan assembling dengan hasil:

a. Nilai impor bahan baku, komponen dan input perantara masih tinggi diatas45%

b. Industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi & kulit bergantung kepada impor bahan baku, komponen dan input perantara masih tinggi.

c. Penanaman Modal Asing sektor manufaktur masih bergantung kepada suplai bahan baku dan komponen dari Luar Negeri.

d. Peralihan teknologi (teknikal, manajemen, pemasaran, pengembangan

organisasi dan keterkaitan eksternal) dari PMA masih terbatas

e.Pengembangan produk dengan merek sendiri dan pembangunan jaringan pemasaran masih terbatas

* Tidak ada industri berteknologi menengah

a. Kontribusi industri berteknologi menengah (logam, karet, plastik, semen)terhadap pembangunan sektor industri manufaktur menurun tahun 1985 -1997.

b. Kontribusi produk padat modal (material dari plastik, karet, pupuk, kertas,besi & baja) terhadap ekspor menurun 1985 – 1997

c. Produksi produk dengan teknologi rendah berkembang pesat.

* Konsentrasi regional. Industri menengah dan besar terkonsentrasi di Jawa.

2. Kelemahan organisasi:

* Industri kecil dan menengah masih terbelakang disebabkan produktivtas rendah dan jumlah tenaga kerja masih banyak (padat Karya).
* Konsentrasi Pasar
* Kapasitas menyerap dan mengembangkan teknologi masih lemah
* Sumber daya manusia yang lemah

Strategi Pengembangan Sektor Industri

Peranan sektor industri dalam pembangunan adalah untuk memberikan nilai tambah faktor-faktor produksi. Pada dasarnya peranan sektor industri dalam pembangunan ini dikembangkan menjadi strategi industrialisasi yang meliputi:

1. Strategi Industri Substitusi Impor(SISI) / *Inward Looking Strategy*

Yaitu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan berbagai jenis industri yang menghasilkan barang-barang untuk menggantikan kebutuhan akan barang-barang impor produk-produk sejenis.

Bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestik yang dapat

menggantikan produk impor.

Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea dan Taiwan.

Pertimbangan menggunakan strategi ini:

* Sumber daya alam danfaktor produksi cukup tersedia
* Potensi permintaan dalam negeri memadai
* Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri
* Kesempatan kerja menjadi luas
* Pengurangan ketergantungan impor, sehingga defisit berkurang

2. Strategi Industri Promosi Ekspor (SIPE) / *Outward Looking Strategy*

Yaitu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan berbagai jenis industri yang menghasilkan produk-produk untuk diekspor.

Beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri

dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing.

Agar strategi tersebut dapat berhasil, maka :

* Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang yang bersangkutan baik pasar input maupun output.
* Tingkat proteksi impor harus rendah
* Nilai tukar harus realistis
* Ada insentif untuk peningkatan ekspor.

**Latihan Soal**

1. Bagaimana peran sektor industri dalam pembangunan di Indonesia?
2. Jelaskan permasalahandan strategi pembangunan sektor industri!
3. Apa yang dimaksud dengan Strategi Industri Substitusi Impor (SISI) dan Strategi Industri Promosi Ekspor (SIPE)?
4. Dilihat dari sumbangan terhadap pembentukan PDB, perekonomian kita sudah memasuki era industrialisasi (industri manufaktur), tetapi bila dilihat dari penyerapan tenaga kerja, perekonomian kita masih bersifat agraris. Bagaimana pendapat anda dengan pernyataan tersebut? Dan kenapa bisa terjadi demikian?

**BAB 9**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**(APBN)**

**Standar Kompetensi :**

Memahami dan mampu menganalisis anggaran pendapatan dan belanja negara

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis peran dan fungsi APBN, dampaknya terhadap perekonomian, prinsip-prinsip dalam APBN dan proses anggaran.

1. **Peran dan fungsi APBN**

Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah pasti mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (*expansionary*), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (*contractionary*). Timbullah gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. (Suparmoko, 1992).

Rincian tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya akan nampak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jadi melalui indikator APBN dapat dianalisis seberapa jauh peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yang disetujui oleh [Dewan Perwakilan Rakyat](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat).

APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan [Undang-Undang](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahunsering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal. (Anne Booth dan Peter McCawley, 1990)

APBN merupakan unsur pokok dari rencana pembangunan tahunan. Melalui APBN pemerintah melaksanakan program dan proyek pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam Repelita.APBN pada dasarnya merupakan rencana pengeluaran pemerintah dan pemerintahan yang diperkirakan akan diterima untuk satu tahun tertentu.

### Azas penyusunan APBN

* Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
* Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
* Penajaman prioritas pembangunan
* Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

Peran APBN:

* + - 1. APBN Sebagai Alat Mobilisasi Dana Investasi
         * Sumber dana investasi beasal dari tabungan (saving). Sumber dana investasi swasata (perusahaan) berasal dari tabungan masyarakat yang terhimpun pada lembaga keuangan bank. Sedangkan sumber dana invstasi pemerintah berasal dari tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah terbentuk dari sisa penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
         * Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (PNBP).
      2. APBN sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi
* Pemerintah telah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tindakan-tindakan ini dapat diringkas sebagai berikut :

Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total.

Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.

Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatasi.

Kebijaksanaananggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri.(Anne Booth dan Peter McCawley, 1990)

Fungsi APBN:

* **Fungsi otorisasi**, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada [rakyat](http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat).
* **Fungsi perencanaan**, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut.
* **Fungsi pengawasan**, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan [pemerintah](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah) negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
* **Fungsi alokasi**, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
* **Fungsi distribusi**, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
* **Fungsi stabilisasi**, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

1. **Dampak APBN terhadap Perekonomian**

Ada beberapa cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang masing-masing menghasilkan tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN-nya. Tergantung pada tujuan analisanya.

Ada empat tolok ukur dampak APBN, yaitu :

1. *Saldo Anggaran Keseluruhan* 
   * Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai :

G – T = B = Bn + Bb + Bf ………………………… (1)

*Keterangan :*

G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.

T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak

B = Pinjaman total pemerintah

Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan

Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan

Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri

* + Pemerintah Orba tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :

G – T = B = Bb + Bf ……………………………………… (2)

* + Tapi APBN di masa Orba dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang :

G – T – B = 0 ……………………………………… (3)

* + Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhann defisit dibiayai melalui:

Pembiayaan Dalam Negeri :

* + Perbankan Dalam Negeri
  + Non Perbankan Dalam Negeri

Pembiayaan Luar Negeri Bersih

* + Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
  + Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

1. *Konsep Nilai Bersih* 
   * + - Konsep ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat.
       - Peningkatan tabungan pemerintah penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya pembangunan (utang) dari luar negeri. Namun kelemahan konsep ini hanya mengukur pembentukan modal pemerintah berupa penambahan jumlah aktiva fisik (dalam pos “pengeluaran Pembangunan”), tidak memperhitungkan pembentukan modal manusiawi (dalam pos “pengeluaran rutin”) seperti gaji guru, dokter, dan lain-lain pengeluaran lancar.
2. *Defisit Domestik*

Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap perekonomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.

Anne Booth dan Peter McCawley (1990)mengemukakan perlunya dipisahkan dua dampak APBN yang berbeda terhadap permintaan agregat (G – T), yaitu pengaruhnya terhadap GDP dan pengaruhnya terhadap neraca pembayaran.

Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan luar negeri)

G = Gd + Gf

T = Td + Tf,

maka persamaan (2) di atas menjadi

(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf

(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB

(Gf–Tf)=dampak langsung putaran pertama terhadap neraca pembayaran.

1. *Defisit Moneter Indonesia*

Konsep ini banyak digunakan dikalangan pejabat-pejabat keuangan dan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”).

Menurut definisi ini, defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan :

G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0 (saat itu)

Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih: bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung dikaitkan dengan sumber pembiayaannya.

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 (tujuh) indikator perekonomian makro, yaitu:

1. [Produk Domestik Bruto](http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_Domestik_Bruto) (PDB) dalam [rupiah](http://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah)
2. [Pertumbuhan ekonomi tahunan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi)
3. [Inflasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi)
4. Nilai tukar rupiah per [USD](http://id.wikipedia.org/wiki/Dolar_Amerika_Serikat)
5. Suku bunga [SBI](http://id.wikipedia.org/wiki/SBI)(Sertifikat Bank Indonesia) 3 bulan
6. Harga minyak Indonesia (USD/barel)
7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)
   * + 1. **PRINSIP-PRINSIP DALAM APBN**
   1. Prinsip Anggaran Defisit

(a) Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan :

* + Pinjaman Luar Negeri tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai sumber pembiayaan.
  + Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan Dalam Negeri + sumber pembiayaan Luar Negeri (bersih)

(b) Sebagai perbandingan dapat diringkas sebagai berikut :

Anggaran Defisit Anggaran Berimbang

PNH – BN = DA PDN – PR = TP

DA = PbDN + PbLN DAP = AP – TP

PbDN = PkDN + Non – Pk DN

PbLN = PPLN – PC PULN

Keterangan : Keterangan :

PNH= pendapatan negara PDN = Pendapatan DN

dan hibah PR = pengeluaran rutin

BN = belanja negara TP = tabungan pemerintah

DA = defisit Anggaran DAP=defisitanggaranpembangunan

PbDN= pembiayaan DN AP = anggaran pembangunan

PkDN= Perbankan DN BLN = bantuan luar negeri

Non-PkDN = Non-Perbankan DN

PbLN = Pembiayaan LN

PPLN = Penerimaan pinjaman LN

PCPULN = Pembayaran Cicilan Pokok Utang luar Negeri

* 1. Prinsip Anggaran Dinamis
* Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran dikatakan bersifat dinamis absolut apabila tabungan pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat. Anggaran bersifat dinamis relatif apabila prosentase kenaikan tabungan pemerintah (ΔTP) terus meningkat atau prosentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun.
* Anggaran dinamis relatif dapat dihitung dengan cara :
  + - 1. Prosentase perubahan TP (ΔTP)

TPx  - TP(x-1)

ΔTP = ---------------------- . 100%

TP(x-1)

* + - 1. Prosentase Ketergantungan Pembiayaan

BLN

Bi = -------------- . 100%

ΔP

Keterangan :

TPz= tabungan pemerintah tahun x

TP(x-1)= tabungan pemerintah tahun sebelumnya

B1 = tingkat ketergantungan pembiayaan dari bantuan luar negeri

* 1. Prinsip Anggaran Fungsional
     + - * Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan/pinjaman luar negeri hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin.

Prinsip ini sesuai dengan azas “bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan/pinjaman luarnegeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsionalitas anggaran.

* + - * + Di sini perlu kiranya diberi tolok ukur kuantitatif untuk menentukan sampai seberapa jauh makna kata “sebagai pelengkap” misalnya :

Bila nilai Ri : > 50% = bantuan/pinjaman luar negeri sebagai sumber daya utama

Bila nilai Ri : 20% - 50% = bantuan/ pinjaman luar negeri sebagai sumber dana penting.

Bila nilai Ri : < 20% = bantuan/ pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pelengkap

Sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit.

**D. Proses anggaran**

### Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

1. Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan [Peraturan Presiden](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden).

Berdasarkan perkembangan,ditengah-tengah berjalannya tahunanggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran [DPR](http://id.wikipedia.org/wiki/DPR).Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

### Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa [Laporan keuangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan) yang telah diperiksa oleh [Badan Pemeriksa Keuangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan).

Belanja terdiri atas dua jenis:

1. **Belanja Pemerintah Pusat**, adalahbelanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
2. **Belanja Daerah**, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan [APBD](http://id.wikipedia.org/wiki/APBD) daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
   1. Dana Bagi Hasil
   2. [Dana Alokasi Umum](http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum)
   3. [Dana Alokasi Khusus](http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Khusus)
   4. [Dana Otonomi Khusus](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_Otonomi_Khusus&action=edit&redlink=1).

Pembiayaan meliputi:

1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, [Surat Utang Negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Utang_Negara), serta penyertaan modal negara.
2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
   * Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
   * Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

**Latihan Soal**

* 1. Apa dampak APBN terhadap perekonomian?
  2. Jelaskan prinsip-prinsip dalam APBN!
  3. Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 (tujuh) indikator perekonomian makro. Sebutkan!
  4. Bagaimana proses anggaran itu terjadi?

**BAB 10**

**PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA**

**Standar Kompetensi :**

Memahami peran sektor luar negeri pada perekonomian indonesia

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa mengetahui dan memahami:

* + - * + Kebijaksanaan dan peranan perdagangan luar negeri bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
        + Hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam melaksanakan perdagangan antar negara.
        + Perkembangan neraca pembayaran.
        + Peranan kurs valuta asing bagi perekonomian Indonesia.

**Kebijaksanaan dan peranan perdagangan luar negeri bagi pembangunan ekonomi Indonesia.**

Perkembangan ekonomi dunia yang begitu pesat telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan mempertajam persaingan yang menambah semakin rumitnya strategi pembangunan yang mengandalkan ekspor. Di satu pihak hal itu merupakan tantangan dan kendala yang membatasi. Di pihak lain hal tersebut merupakan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional.

Perdagangan antar negara atau sering disebut dengan perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Manfaat dari perdagangan internasional adalah:

* Dapat memperoleh barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri
* Memperoleh keuntungan dari spesialisasi produk bagi tiap-tiap negara
* Memperluas pasar hasil produksi
* Meningkatkan devisa
* Meningkatkan teknologi

Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Salvatore (2004) menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan (*trade as engine of growth*). Jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Tambunan (2005) menyatakan bahwa pada awal tahun 1980an Indonesia menetapkan kebijakan yang berupa *export promotion*. Dengan demikian, kebijakan tersebut menjadikan ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan.

Menurut Appleyard (2004), perpindahan modal khususnya untuk investasi langsung diawali dengan adanya perdagangan internasional. Ketika terjadi perdagangan internasional yang berupa ekspor dan impor, akan memunculkan kemungkinan untuk memindahkan tempat produksi. Peningkatan ukuran pasar yang semakin besar yang ditandai dengan peningkatan impor suatu jenis barang pada suatu negara, akan memunculkan kemungkinan untuk memproduksi barang tersebut di negara importir. Kemungikinan itu didasarkan dengan melihat perbandingan antara biaya produksi di negara eksportir ditambah dengan biaya transportasi dengan biaya yang muncul jika barang tersebut diproduksi di negara importir. Jika biaya produksi di negara eksportir ditambah biaya transportasi lebih besar dari biaya produksi di negara importir, maka investor akan memindahkan lokasi produksinya di negara importir.

Pengaruh Perdagangan luar negeri dapat diketahui melalui indikator indeks nilai tukar perdagangan (*terms of trade*), perubahan *terms of trade* (TOT) dari tahun ke tahun akan mempengaruhi besarnya pendapatan domestik bruto (GDY = Gross Domestic Yield).

**Hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam melaksanakan perdagangan antar negara.**

Globalisasi ekonomi adalah berlangsungnya gerak arus barang, jasa dan uang di dunia secara dinamis, sesuai dengan prinsip ekonomi, dimana berbagai hambatan terhadap arus tersebut menjadi semakin berkurang. Hambatan berupa proteksionisme perdagangan, larangan investasi, dan regulasi devisa serta moneter yang mengekang arus jasa dan kapital internasional semakin lama menjadi semakin berkurang bila globalisasi berlangsung. (Sjahrir, 1995).

Hambatan perdagangan antar negara:

1. Hambatan Tariff

Tariff adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara (komoditi impor). Tariff sendiri ditentukan dengan jumlah yang berbeda untuk masing-masing komoditi impor.

1. Hambatan Quota

Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering ditetapkan oleh suatu negara untuk membatasi masukan komoditi impor ke negaranya. Quota sendiri dapat diartikan sebagai tindakan pemerintahan suatu negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke negara tersebut. Seperti halnya tariff, tindakan quota ini tertentu tidak akan menyenangkan bagi negara pengekspornya. Indonesia sendiri pernah menghadapi quota impor yang diterapkan oleh sistem perekonomian Amerika.

1. Hambatan Dumping

Meskipun karakteristiknya tidak seperti tariff dan quota, namun dumping sering menjadi suatu masalah bagi suatu negara dalam proses perdagangan luar negerinya, seperti yang dialami baru-baru ini dimana industri sepeda Indonesia dituduh melakukan politik dumping. Dumping sendiri diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah di luar negeri dibanding harga didalam negeri untuk produk yang sama.

1. Hambatan Embargo/sangsi ekonomi

Sejarah membuktikan bahwa suatu negara yang karena tindakannya dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu negara, akan menerima atau dikenakan sanksi ekonomi oleh negara yang lain (PBB). Akibat dari hambatan ini biasanya lebih buruk dan meluas bagi masyarakat yang terkena sanksi ekonomi daripada akibat yang ditimbulkan oleh hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea.

Alasan untuk hambatan perdagangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdagangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi. Di Indonesia, hambatan perdagangan banyak digunakan untuk membatasi impor pertanian dari luar negeri untuk melindungi petani dari anjloknya harga lokal.

**Perkembangan neraca pembayaran.**

Neraca pembayaran (*balance of payment*) adalah catatan transaksi antara penduduk suatu negara dengan negara-negara lainnya. Terdapat 2 (dua) jenis neraca pembayaran, yaitu neraca perdagangan dan neraca modal.

Transaksi berjalan (*current account*), mencatat perdagangan barang dan jasa, termasuk pembayaran transfer. Yang termasuk jasa ialah pengangkutan, pembayaran royalti, pembayaran bunga, pendapatan investasi netto, bunga dan keuntungan dari aset perusahaan dikurangi pendapatan pihak luar negeri dari aset yang dimilikinya di negara lain.

Pembayaran transfer terdiri dari pengiriman uang, hadiah dan bantuan. Secara sederhana, neraca perdagangan (*trade balance*) berisi catatan perdagangan barang. Dengan menambahkan transfer netto ke dalam neraca perdagangan, maka akan mendapatkan sebuah transaksi berjalan.

Perhitungan sederhana neraca pembayaran adalah bahwa setiap transaksi yang meningkatkan pembayaran oleh suatu negara dihitung sebagai defisit dalam neraca pembayaran negara tersebut untuk negara lain. Item defisit terdiri dari: impor mobil, pemberian kepada orang asing, pembelian lahan di luar negeri, atau deposit yang ada di bank luar negeri.

Transaksi dalam neraca pembayaran dibedakan menjadi:

1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
2. Transaksi kredit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

Situasi neraca pembayaran selama empat tahun pelaksanaan Repelita V secara umum tetap terkendali dalam batas-batas yang wajar. Perkembangan neraca pembayaran tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, impor, dan arus modal luar negeri.

**Peranan kurs valuta asing bagi perekonomian Indonesia.**

Dalam pembayaran antar negara ada suatu kekhususan yang tidak terdapat dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri. Sebab semua negara mempunyai mata uang atau valutanya sendiri, yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di dalam batas-batas daerah kekuasaan itu sendiri, tetapi belum tentu mau diterima luar negeri. Jadi pembayaran antar negara harus menyangkut lebih dari satu macam mata uang, yang harus dipertukarkan satu sama lain dengan harga atau kurs tertentu. Hal inilah yang membuat perdagangan dan pembayaran internasional menjadi perkara yang rumit. Untuk itu dibuat alat pembayaran yang bisa digunakan oleh banyak negara (antar negara) atau disebut dengan alat pembayaran internasional, yakni valuta asing.

Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara yang harus dikorbankan atau dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing.

Masalah kurs valuta asing mulai muncul ketika transaksi ekonomi sudah mulai melibatkan dua negara (mata uang) atau lebih, tentunya sebagai alat untuk menjembatani perbedaan mata uang di masing-masing negara.

Beberapa istilah berkaitan dengan valuta asing:

* Defresiasi adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
* Afresiasi adalah naiknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dengan demikian jika rupiah mengalami defresiasi (mengalami penurunan nilai maka mata uang dollar akan mengalami afresiasi).
* Spot rate adalah nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2x24 jam saja. Sehingga jika sudah melewati batas waktu diatas maka nilai tukar tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Tiga sistem atau cara menentukan tinggi rendahnya kurs atau nilai tukar valuta asing:

1. Kurs tetap, karena dikaitkan dengan emas sebagai standar atau patokannya.
2. Kurs bebas, yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasaran bebas, lepas dari kaitan dengan emas. Dalam hal ini, kurs bisa naik-turun dengan bebas.
3. Perjanjian kurs dibuat stabil berdasarkan internasional yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam perbandingan tertentu dengan dollar atau emas sebagai patokan.

Apabila mata uang suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan valuta lain (kurs resmi lebih tinggi daripada perbandingan daya beli yang sesungguhnya atau disebut *over valued*), **akibatnya ekspor akan macet dan impor didorong terlalu besar, sehingga keseimbangan neraca pembayaran terancam. Hal yang sebaliknya terjadi, apabila mata uang dinilai terlalu rendah atau *under valued,* maka ekspor akan bertambah besar, tetapi impor akan macet.**

Peran valuta asing terhadap perekonomian di Indonesia adalah sangat penting. Karena valuta asing merupakan alat pembayaran antar negara. Barang dan jasa yang diimpor itu harus dibayar. Untuk pembayaran itu diperlukan valuta asing atau devisa (*foreign exchange*), yaitu valuta (mata uang) yang mau diterima oleh dunia internasional. Devisa diperoleh dari hasil ekspor (devisa umum) atau kredit bank luar negeri (devisa kredit).

**Latihan Soal**

* + 1. Jelaskan kebijaksanaan dan peranan perdagangan luar negeri bagi pembangunan ekonomi Indonesia!
    2. Jelaskan hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam melaksanakan perdagangan antar negara!
    3. Jelaskan tiga sistem atau cara menentukan tinggi rendahnya kurs atau nilai tukar valuta asing!
    4. Jelaskan peran valuta asing terhadap perekonomian di Indonesia!

**BAB 11**

**KEBIJAKSAAN MONETER DAN FISKAL**

**Standar Kompetensi :**

Memahami dan mampu menganalisis kebijaksanaan moneter dan fiskal.

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa mengetahui dan memahamikebijaksanaan moneter dan , kebijaksanaan fiskal di sektor luar negeri

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (*tax*) dan pengeluaran pemerintah (*goverment expenditure*). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga.

Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor–sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Keempat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing–masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.

1. **Kebijaksanaan moneter**

Pembahasan tentang masalah moneter dalam suatu negara sering kali harus dimulai dengan pembahasan tentang *financial deepening*. Karena konsep ini akan membawa kita kepada observasi yang lebih mendalam tentang besar kecilnya suatu sistem keuangan dalam suatu negara. Semakin tinggi suatu perekonomian maka semakin besar peran sistem keuangan, karena semakin banyak pula penggunaan uang dalam berbagai transaksi perekonomian.

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kebijaksanaan moneter memegang peranan penting di dalam memacu pembangunan dengan mempengaruhi biaya dan pendapatan kredit, dengan pengendalian inflasi, dan dengan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran.

Kebijaksanaan moneter mengacu pada kebijaksanaan Pemerintah di suatu negara yang menyangkut masalah-masalah moneter. Kebijaksanaan tersebut dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan yang berkenaan dengan:

Pengendalian lembaga keuangan.

Penjualan dan pembelian secara aktif surat-surat berharga oleh pemerintah yang sengaja dilakukan untuk mengatur jumlah uang yang beredar.

Pembelian dan penjualan secara pasif surat-surat berharga oleh pemerintah dalam upayanya untuk mempertahankan tingkat bunga, stabilitas harga saham, dan sebagainya.

Kebijakan moneterdidefinisikan sebagai proses mengatur [persediaan uang](http://id.wikipedia.org/wiki/Persediaan_uang) sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan [inflasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi), mencapai [pekerja](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pekerja&action=edit&redlink=1) penuh atau [lebih sejahtera](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Menghitung_kesejahteraan&action=edit&redlink=1). Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar [bunga pinjaman](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunga_pinjaman&action=edit&redlink=1), "[*margin requirement*](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Margin_requirement&action=edit&redlink=1)", [kapitalisasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisasi_pasar) untuk [bank](http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan) atau bahkan bertindak sebagai [peminjam usaha terakhir](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peminjam_usaha_terakhir&action=edit&redlink=1) atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

## Jenis-jenis Kebijakan Moneter

* Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*)

* Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary contractive policy*)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*)

Instrumen Kebijakan Moneter:

* 1. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SBPU (Surat Berharga Pasar Uang).

* 1. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

* 1. Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

* 1. Imbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

## Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

1. **Kebijaksanaan fiskal**

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Dari semua unsur APBN, hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

1. Pada sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi dan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga dari perusahaan.

Kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dan lain-lain. Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.

1. Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilan dan keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negri.
2. Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha danPemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada.
3. Pada sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.

Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peranpemerintah.

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa *contractionary monetary policy* dan *vice versa*. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa *open market operation* memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.

Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

* + - 1. Anggaran Defisit (*Defisit Budget*) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

2. Anggaran Surplus (*Surplus Budget*) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran Berimbang (*Balanced Budget*)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

1. **Kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan fiskal di sektor luar negeri**
   * + 1. Kebijaksanaan menekan pengeluaran

Dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia.

Cara-cara yang ditempuh adalah :

a. Menaikkan pajak pendapatan

b. Mengurangi pengeluaran pemerintah

Jika dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil tersebut, kebijaksanaan ini tampaknya tidak cocok untuk keadaan perekonomian yang sedang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, karena dengan kondisi seperti itu, perekonomian yang sedang membutuhkan dana yang besar untuk menaikkan investasi dapat tercipta lapangan pekejaan yang menampung para penganggur tersebut.

* + - 1. Kebijaksanaan memindah pengeluaran.

Dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian.

Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan.

Jika kebijaksanaan dilakukan secara paksa:

a. Menekan tariff atau quota

b. Mengawasi pemakaian valuta asing

Jika kebijaksanaan dilakukan secara Rangsangan:

a. Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor

b. Menstabilkan upah dan harga di dalam negeri

c. Melakukan Devaluasi. Devaluasi adalah Suatu tindakan pemerintah dengan menaikkan nilai tukar mata uang Rupiah dan Dolar, devaluasi juga menyebabkan semakin banyak rupiah yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu unit dolar.

Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang mendekati *full employment* dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.

Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan diatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.

**Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter**

Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat.

Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada gilirannya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga, dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.

**Latihan Soal**

* + - * 1. Berikan penjelasan tentang perbedaan kebijakan fiskal dan moneter!
        2. Mengapa peredaran uang harus diatur oleh pemerintah? Apa dampaknya bila uang beredar terlalu banyak atau terlalu sedikit?
        3. Apa h**ubungan antara kebijakan fiskal dan moneter?**

**BAB 12**

**EKSPOR UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI**

**Standar Kompetensi :**

Memahami dan mampu menganalisis ekspor untuk pembangunan ekonomi.

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis pentingnya ekspor, peningkatan ekspor non migas dan manufaktur, serta kontribusi industri menengah kecil dalam ekspor migas.

**Ekspor**

          Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar  membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima.

Ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang sangat dibutuhkan oleh negara atau daerah yang perekonomiannya bersifat terbuka seperti Indonesia. Karena ekspor secara luas ke berbagai negara memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomiannya.

Proses ekspor yang dilakukan dengan skala besar harus melalui bea dan cukai. Bea dan cukai dalam hal ini berfungsi sebagai badan yang mengawasi barang-barang yang akan masuk maupun yang akan keluar ke dalam negeri. Kegiatan ekspor dilakukan umumnya untuk mengendalikan nilai barang yang ada di dalam negeri. Jika didalam negara jumlah barang terlalu melimpah akan mengakibatkan nilai barang jatuh, maka mengekspor barang tersebut ke negara lain perlu dilakukan untuk mengendalikan harga barang.

          Pengutamaan Ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu,ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi-dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor.Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik,menjadi sesuatu yang sangat lazim.

Persaingan sangat tajam antar   berbagai produk. Selain harga,kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. Adapun selama periode ini , ekspor dari sepuluh golongan barang memberikan kontribusi 58,8 persen terhadap total ekspor nonmigas. Kesepuluh golongan tersebut adalah, lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, mesin atau peralatan listrik, karet dan barang dari karet, mesin-mesin atau pesawat mekanik. Kemudian ada pula bijih, kerak, dan abu logam, kertas atau karton, pakaian jadi bukan rajutan, kayu dan barang dari kayu, serta timah.

Secara umum produk ekspor dibedakan menjadi:

1. Barang migas (minyak bumi dan gas)

Adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas.

1. Barang non migas

Adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas. Seperti hasil perkebunan, pertanian peternakan, perikanan dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas.

Produk eskpor Indonesia meliputi hasil produk pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri dan begitupun juga jasa.

1. Hasil pertanian: karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, kina, tembakau dan coklat.
2. Hasil hutan: kayu dan rotan. Ekpor kayu atau rotan tidak boleh dalam bentuk kayu gelondongan atau bahan mentah, namun dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi, seperti mebel.
3. Hasil perikanan. Hasil perikanan yang banyak diekspor merupakan hasil dari laut, seperti ikan tuna, cakalang, udang dan bandeng.
4. Hasil pertambangan:timah, alumunium, batu bara, tembaga, dan emas.
5. Hasil industri: semen, pupuk, tekstil dan pakain jadi.
6. Jasa: mengirim tenaga kerja keluar negeri antara lain ke malaysia dan negara-negara timur tengah.

**Manfaat ekspor:**

1. Memacu pertumbuhan ekonomi
2. Pendapatan negara akan bertambah karena adanya devisa
3. Meningkatkan perekonomian rakyat
4. Mendorong berkembangnya kegiatan industri.

**Hubungan ekspor dan pembangunan perekonomian Indonesia**

Salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Michael P. Todaro & Stephen, bahwa ekspor merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor akan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber-sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial untuk berbagai produk ekspor yang mana tanpa produk-produk tersebut, maka negara-negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan perekonomian nasionalnya. Ekspor juga dapat membantu semua negara dalam mengambil keuntungan dari skala ekonomi yang mereka miliki.

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output yang lebih tinggi, lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan.

**Peningkatan ekspor non migas dan manufaktur**

Sebagai motor penggerak (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi, sektor industrikhususnya industri pengolahan nonmigas (manufaktur) menempati posisi strategisuntuk terus ditingkatkan kinerjanya. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, kinerja industrimanufaktur mengalami penurunan cukup drastis. Kondisi tersebut disebabkan terutamakarena beban hutang, terutama yang berasal dari luar negeri.Di banyak perusahaan besaryang membengkak akibat merosot drastisnya nilai tukar Rupiah serta masih terusmenurunnya daya saing pada banyak produk ekspornya.

Dalam rangka mengembalikankinerjanya, berbagai upaya pemulihan dan restrukturisasi industri telah diprogramkansejak 1999. Namun berbagai upaya tersebut masih juga belum cukup berhasilmengembalikan kinerja sektor ini pada keadaan sebelum krisis. Situasi yang dinilaimasih banyak mengganggu adalah belum terdapatnya lingkungan usaha yang kondusifdan masih terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung proses peningkatanproduksi yang diharapkan.

Perkembangan industri manufaktur tidak terlepas dari peran industri kecil danmenengah. Industri kecil dan menengah memberikan kontribusi penting kepadapertumbuhan ekonomi, terutama perluasan kesempatan kerja. Potensi ekspornya juga cukup besar walaupun kontribusinyamasih rendah.

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi di berbagai sektor ternyataturut mendorong tumbuhnya industri manufaktur lokal, meski sebagian besar skalanyamasih kecil dan menengah. Sebagai contoh, Tahun 2005, penetrasi penggunaan komputer pribadi(*personal computer*/PC) di Indonesia diperkirakan mencapai 3,05 juta unit, ataumeningkat 29,8 persen dari total pemakaian PC tahun 2004.Tantangan yang dihadapi pada tahun 2006 adalah masih lemahnya daya saingproduk industri di pasar internasional yang antara lain disebabkan tingginya biaya yangtidak produktif akibat sarana dan layanan publik yang belum baik. Tantanganberikutnya adalah masih lemahnya keterkaitan antara industri hilir dengan industri kecildan menengah, lemahnya struktur klaster industri-industri unggulan kita, sertapenguasaan teknologi yang belum terbangun dengan baik. Sementara itu, dengan tingkatutilisasi kapasitas masih di bawah 70 persen, sektor ini belum dapat diharapkan untukberperan penting di dalam mendukung upaya penyerapan tenaga kerja baru, padahaltingginya tingkat pengangguran adalah masalah yang mendesak untuk diselesaikan.Dengan demikian, tantangan utamanya adalah meningkatkan tumbuhnya investasi barudi dalam kegiatan produksi.

Dalam rangka memperluas basis produksi, permasalahan dan berbagaiketerbatasan yang dihadapi industri kecil dan menengah kepada akses permodalan,sumberdaya, pemasaran dan informasi merupakan masalah yang perlu dipecahkanbersama agar industri skala ini dapat didorong perkembangannya. Oleh karena itu,arahan kebijakan yang operasional untuk tumbuhnya basis industri baru merupakantantangan yang perlu dirumuskan dengan seksama, yang antara lain melaluipenumbuhan industri pengolahan hasil-hasil pertanian di perdesaan untuk sekaligusmendukung revitalisasi pertanian, dan mengintensifkan penyebaran industri pengolahanke luar Pulau Jawa.Perlu dicermati bahwa terbatasnya kapasitas infrastruktur, rendahnya kualitas SDMserta kecilnya jumlah penduduk sebagai basis tenaga kerja dan pasar produk yangsangat terbatas membuat investasi di Luar Pulau Jawa bisa menjadi kurang menarik.Dengan demikian, perlu ada rumusan kebijakan komprehensif yang tepat untukmenerobos kondisi ini.

**Kontribusi industri menengah kecil dalam ekspor migas.**

Usaha kecil dan menengah merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagaibidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berorientasi ekspor, menurut (Tambunan, 2003) diklasifikasikan menjadi dua:

1. Produsen Eksportir (*Direct Exporter*)

Adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menghasilkan produk ekspor dan menjualnyasecara langsung kepada pembeli dari luar negeri (*buyer*) atau importir*.*

1. Eksportir Tidak Langsung (*Indirect Exporter*).

Adalah Usaha Kecil Menengah(UKM) yang menghasilkan produk ekspor, yang melakukankegiatan ekspor secara tidak secara langsung dengan *buyer*/importir, tetapi melalui agenperdagangan ekspor atau eksportir dalam negeri.

Jumlah UKM Produsen Ekspor hanya0,19 persen dari total UKM di Indonesia. Sedangkan 99,81 persen UKM lainnya melakukanekspor secara tidak langsung dan/atau hanya melakukan penjualan di pasar domestik.

Usaha Kecil (UK) yang mempunyai peranan besar dalam ekspor adalah usaha kecil yangmengandalkan keahlian tangan (*hand made*), seperti kerajinan perhiasan dan ukiran kayu.

Karakteristik tersebut merupakan keunggulan usaha kecil, di mana lebih banyak mengandalkanketerampilan tangan, sehingga cenderung bersifat padat karya. Usaha skala besar (UB)yang cenderung bersifat padat modal, tentunya akan sulit masuk ke dalam dunia usaha ini.Di sisi lain, hal ini memberikan gambaran pentingnya usaha kecil dalam penyerapan tenaga kerja,utamanya pada saat krisis ekonomi.Negara tujuan utama ekspor usaha kecil secara umum adalah Singapura, namun bila ditilik menurutkomoditas, negara tujuan ekspor relatif beragam. Tingginya nilai ekspor ke Singapuramemberikan gambaran masih terdapat potensi peningkatan nilai tambah atau *economic rent* usaha kecil terhadap produk yang diekspor, jika dapat langsung mengekspor ke negara konsumenutama. Hal ini karena Singapura merupakan negara “transit ekspor”, artinya produk usaha kecil yangdiekspor ke Singapura akan diekspor lagi ke negara lain. Walaupun hampir tidak terjadiperubahan orientasi negara tujuan ekspor, namun pangsa ekspor ke tiap negara tujuan antarwaktu cenderung berfluktuatif.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi UKM berorientasi ekspor tidak dapat melakukan eksporsecara langsung, yaitu:

1. *Export trading problem*

Terjadi karena tingginya risiko kegiatan ekspor(baik risiko pembayaran maupun pengiriman barang), adanya tenggang waktu(*time lag*) dalam pembayaran, dan tingginya biaya ekspor.

1. *Financingproblem*.

Terjadi karena terbatasnya modal yang dimiliki UKM dan *finance andguarantee institution problem*, yakni rendahnya dukungan lembaga pembiayaandan penjaminan ekspor terhadap UKM.

Kondisi tersebut mengakibatkan strategipemasaran UKM cenderung menunggu pembeli, sehingga mekanisme perdaganganyang terjadi umumnya adalah *buyer.s market*.

Sementara itu, Hardono (2003) mengemukakan bahwa pada dasarnya usaha kecil menengah memiliki hambatan yang bersifat klasik, yakni hambatan yang berkaitan denganrendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM), lemahnya manajemen usaha,rendahnya akses terhadap sumber pembiayaan dan pasar, serta rendahnyainformasi dan teknologi yang dimilikinya.

UKM yang memiliki hambatan dan kendalausaha berkaitan dengan ekspor diklasifikasikan menjadi dua, yakni:

1. Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang disebabkan kekurangan atau

kelemahan yang melekat pada UKM itu sendiri.

Beberapa aspek yang menjadi hambatan internal bagi UKM dalam kegiatan eksporadalah :

Masih rendahnya komitmen UKM dalam memenuhi pesanan pelanggan, baiklokal maupun mancanegara *(on time delivery*);

Masih minimnya sistem managemen yang diterapkan UKM, khususnya dalamaspek produksi, administrasi, dan keuangan;

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki UKM dalam rangkamemenuhi pesanan;

Rendahnya kualitas SDM, sehingga dalam mengelola usahanya tidakdidasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional;

Terbatasnya modal yang dimiliki UKM, khususnya modal kerja;

Lemahnya jaringan komunikasi dan informasi dengan pihak-pihak terkait,seperti dalam pengadaan bahan baku, terkadang UKM hanya memiliki sumberterbatas, sehingga barang yang diperoleh harganya tinggi;

Rendahnya kemampuan UKM dalam riset dan pengembangan, sehingga belummemenuhi keinginan para *buyer.*

1. eksternal.

Hambatan eksternal adalahhambatan yang disebabkan adanya faktor luar yang tidak melekat pada UKM.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi hambatan eksternal bagi

UKM dalam kegiatan ekspor, yakni :

1. Tidak stabilnya pasokan dan harga bahan baku serta bahan pendukunglainnya;
2. Persyaratan dari *buyer* semakin tinggi, antara lain berkaitan dengan kualitasproduk, kualitas lingkungan sosial, kualitas lingkungan kerja, harga yangbersaing, aspek ramah lingkungan*;*
3. Masih adanya regulasi pemerintah yang kurang kondusif sehingga dapatmenghambat laju ekspor UKM;
4. Rendahnya akses UKM terhadap pasar, antara lain meliputi permintaanproduk, standar kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, dan persaingan harga;
5. Rendahnya akses UKM terhadap sumber pembiayaan, antara lain meliputi informasiskim kredit dan tingginya tingkat bunga;
6. Masih munculnya biaya-biaya siluman yang berkaitan dengan ransportasi, kepabeanan,dan keamanan;
7. Kesulitan memenuhi prosedur dan jangka waktu yang relatif lama untuk mematenkanproduk bagi UKM.

Permasalahan yang dihadapi UKM memang sangat kompleks, sehingga dibutuhkanberbagai pendekatan yang dapat mengurangi hambatan yang ada. Keputusan politikpemerintah di semua lini dan tingkatan yang berusaha memberdayakan UKM sudah tepat,mengingat potensi dan peran UKM terhadap pembangunan nasional. Hal yang penting danmendasar adalah memberikan peluang yang lebih besar kepada para UKM denganmenekan atau mereduksi hambatan-hambatan yang muncul.

Pendekatan yang perlu dilakukan dalam mengurangi hambatan UKM dalam kegiatan ekspor,dapat ditempuh melalui upaya meningkatkan kemampuan finansial dan manajerial UKM,membangun jaringan pemasaran produk ekspor UKM, dan meningkatkan promosi produkekspor UKM. Kebijakan/peraturan pemerintah yang kondusif dan keberpihakan yangsignifikan dunia usaha, merupakan kunci keberhasilan dalam mereduksi hambatan UKMdalam kegiatan ekspor. Di samping itu, diperlukan pemetaan *demand* dan *supply* padanegara-negara tujuan ekspor. Hal ini akan sangat membantu UKM dalam menentukan jenisdan tujuan pasar produk ekspornya.

**Latihan Soal**

Apa hubungan ekspor dan pembangunan perekonomian Indonesia?

Kontribusi apa yang diberikan oleh Industri kecil dan menengah dalam perkembangan industri manufaktur?

Bagaimana pendekatan yang perlu dilakukan dalam mengurangi hambatan UKM dalam kegiatan ekspor?

**BAB 13**

**PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI**

**Standar Kompetensi :**

Memahami dan mampu menganalisis perekonomian Indonesia dalam era globalisasi

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa mengetahui dan memahami:

* + - * + Makna globalisasi
        + Syarat bagi dunia usaha agar bisa unggul di era globalisasi
        + Hubungan buruh dan pengusaha
        + Prospek UKM dalam era perdagangan bebas

**Globalisasi**

Perekonomian antar negara semakin berkaitan erat, peristiwa ekonomi di sebuah negara dengan cepat dan mudah merambah ke negara-negara lain. Globalisasi ekonomi adalah berlangsungnya gerak arus barang, jasa dan uang di dunia secara dinamis, sesuai dengan prinsip ekonomi, dimana berbagai hambatan terhadap arus tersebut menjadi semakin berkurang. Hambatan berupa proteksionisme perdagangan, larangan investasi, dan regulasi devisa serta moneter yang mengekang arus jasa dan kapital internasional semakin lama menjadi semakin berkurang bila globalisasi berlangsung(Sjahrir, 1995).

**Globalisasi perekonomian**merupakan suatu proses kegiatan [ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi) dan [perdagangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan), dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan [pasar](http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar) yang semakin [terintegrasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial) dengan tanpa rintangan batas [teritorial](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teritorial&action=edit&redlink=1) negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam [pasar domestik](http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_domestik).

Perkembangan ekonomi dunia yang begitu pesat telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan mempertajam persaingan yang menambah semakin rumitnya strategi pembangunan yang mengandalkan ekspor. Di satu pihak hal itu merupakan tantangan dan kendala yang membatasi. Di pihak lain hal tersebut merupakan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional.

Pada era globalisasi, dunia mengalami perubahan besar dan mendasar di berbagai bidang dan tingkatan. Perubahan tersebut digerakkan dan didorong oleh adanya:

(1) kemajuan luar biasa (revolusi) yang terjadi di berbagai bidang, terutama teknologi informasidankomunikasi(TIK), teknologi industri, dan bioteknologi;

(2) pergeseran alokasi sumberdaya finansial, manusia, dan sebagainya;

(3) pergeseran struktur geopolitik.

Perubahan besar dan mendasar tersebut memacu proses globalisasi.Proses globalisasi mempunyai 2 (dua) kecenderungan, yaitu:

(1) globalisasi memberikan dorongan kuat terjadinya universalitas yang menyangkut tata nilai, pola pikir, dan pola kerja yang melampaui batas-batas negara (*borderless*); dan

(2) dari perspektif sosial, ekonomi, politik, dan budaya.Globalisasi membuat setiap orang menjadi bagian dari masyarakat global yang perlu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, tetapi di pihak lain globalisasi dapat mengakibatkan munculnya rasa nasionalisme yang sempit sehingga dapat mengakibatkan perpecahan (disintegrasi).

Di Indonesia,prinsip globalisasi adalah adanya pembagian kerja untuk mencapai efisiensi. Sinyalemen bahwa Indonesia dengan tenaga kerja melimpah dan upah buruh murah hanya kebagian industri ”peluh” (*sweatshop*) seperti pakaian jadi dan alas kaki dalam rantai kegiatan produksi global, terbukti sebagian besar benar.China, India, dan Malaysia juga memulai dengan *sweatshop*, tetapi kemudian mampu meng-*upgrade* industrinya dengan cepat. Hal ini yang tidak terjadi di Indonesia. Kebijakan Indonesia menghadapi globalisasi sendiri selama ini lebih didasarkan pada sikap pragmatisme.Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Hadi Soesastro (Globalization: Challenge for Indonesia) mengatakan, kebijakan pemerintah menghadapi globalisasi tidak didasarkan pada pertimbangan ideologis, tetapi lebih pada penilaian obyektif apa yang bisa dicapai negara-negara Asia Timur lain.

***Gejala-gejala Globalisasi:***

* + 1. Globalisasi terjadi dalam kegiatan finansial, produksi investasi dan perdagangan.
    2. Proses globalisasi meningkatkan kadar ketergantungan antar negara, menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia
    3. Gejala yang menonjol adalah terpisahnya kegiatan ekonomi primer dengan ekonomi industri sehingga kaitan poduksi ke belakang industri pengolahan makin melemah. Dampaknya adalah merosotnya harga komoditi primer yang disebabkan permintaan yang lesu.

***Faktor Penyebab Globalisasi***

* + Makin menipisnya batas investasi dan pasar secara nasional, regional maupun internasional disebabkan karena adanya:
    1. Komunikasi dan transportasi yang makin canggih
    2. Lalu lintas devisa yang semakin bebas
    3. Ekonomi negara yang semakin terbuka
    4. Penggunaan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di tiap negara semakin digalakkan
    5. Metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien
    6. Pesatnya perkembangan perusahaan multinasional (TNC) di seluruh dunia. (H. H. Prijono Tjiptoharijanto, 1993).

***Kecenderungan Dalam Globalisasi:***

a) Masyarakat dunia dewasa ini sedang berubah dari era masyarakat industri memasuki ke era masyarakat informasi. Masyarakat tidak bisa menutup diri karena teknologi informasi mampu menembus batas-batas wilayah kekuasaan negara.

b) Hubungan saling ketergantungan menyebabkan sistem ekonomi nasional cenderung menjadi bagian sistem ekonomi global. Aktivitas ekonomi berlangsung dalam arus gerak barang, jasa dan uang di dunia secara dinamis sesuai dengan prinsip ekonomi.

c) Ketergantungan ekonomi yang sedang tumbuh berubah dari formasi hubungan antar negara menjadi *inter-region* (antar blok). Kekuatan blok-blok ekonomi itu akhirnya akan menjadi ukuran *bargaining power* tiap negara dalam perdagangan internasional.

***Dampak globalisasi ekonomi:***

* + Makin terpisahnya kegiatan ekonomi primer dengan ekonomi industri mengakibatkan :
    1. Penggunaan material dalam industri makin sedikit
    2. Kaitan produksi ke belakang produksi pengolahan makin melemah
    3. Harga komoditi primer merosot karena menurunnya permintaan
    4. Akibat robotisasi dalam industri, maka kesempatan kerja berkurang, pengangguran meningkat.
    5. Kaitan antar ekonomi moneter-perbankan dengan ekonomi riil (sektor industri dan perdagangan) menjadi melemah
    6. Hubungan antar negara berubah menjadi hubungan antar blok ekonomi/ pakta perdagangan (inter-region)
    7. *Bargaining power* tiap negara ditentukan oleh kekuatan pasar blok ekonominya.
    8. Perubahan lingkungan hidup mewarnai berbagai kebijakan ekonomi dunia, seperti : isu “pembangunan berkesinambungan”, masalah “limbah industri”, “nuklir”, “*global warning*” dan munculnya persaingan antar “blok ekonomi”

***Kebijakan dalam Era Globalisasi***

* + - * Komponen dalam penyusunan strategi global
  1. Mengkaji perkembangan ekonomi dunia yang relevan dengan Indonesia, terutama ekonomi Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang.
  2. Mengikuti prospek mata uang dollar AS, DM Jerman dan Yen Jepang.
  3. Memonitor perkembangan politik dan keamanan dalam negeri serta arah kebijakan pembangunan pada umumnya.
  4. Memonitor perkembangan ekonomi keuangan Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional dan sektoral, APBN dan fiskal, neracapembayaran terutama transaksi berjalan, Jumlah Uang Beredar, inflasi, nilai tukar rupiah, likuiditas bank, tingkat suku bunga.
  5. Menetapkan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan beserta anggarannya.
     + - Aspek-aspek Makro dalam Kebijakan Global
  6. Deregulasi

Kebijakan deregulasi harus terus dilanjutkan nya secara konsisten di sektor riil untuk meningkatkan efisiensi, daya saing di pasar global.

* 1. Prioritas Investasi

Baik investasi modal asing maupun modal dalam negeri ditujukan untuk yang berorientasi ekspor. Untuk industri yang *resource base* perlu dorongan pemerintah, karena industri ini bisa menghemat devisa.

* 1. Kemitraan Usaha

Indonesia yang penuh dengan *faktional* ekonomi (BUMN vs Swasta, Pribumi vs Non Pribumi dan sebagainya) harus dihilangkan dan diganti dengan kemitraan usaha, sebab dewasa ini tidak ada satu unit usaha yang independent, tetapi saling ketergantungan satu sama lain. Perlu adanya *political will* untuk mencegah praktek-praktek monopoli, oligopoli oleh kelompok yang kuat.

* 1. Perubahan Orientasi Bisnis

Perlu perubahan dari orientasi bisnis untuk memaksimalisasi profit ke orientasi maksimalisasi pasar. Indonesia harus memasuki pasar global dan menguasai seluas-luasnya jaringan distribusinya.

* 1. Kebijakan yang konduktif

Kebijakan yang dilakukan pemerintah hendaknya sesuai dengan realita di lapangan, sehingga tidak terjadi distorsi antara kebijakan yang diambil pemerintah dengan langkah yang diambil oleh pengusaha.

* + - * Aspek-aspek Mikro Dalam Kebijakan Global:

1. Sumber Dana Permodalan

Mengefektifkan dan mendiverisifikasikan sumber dana permodalan yang tersedia.

1. Pilihan Teknologi

Melakukan pilihan teknologi yang tepat dan pas dengan pilihan bidang usaha, dilihat dari segi operasional maupun outputnya.

1. Sumber Daya Manusia

Meningkatkan profesionalisme sumber daya, baik mengenai *managerial skill* maupun luasnya wawasan globalnya.

1. Pilihan Bidang usaha

Pilihan bidang usaha berpijak pada *resource base*, yaitu *raw material* yang tersedia pada sumber daya alam kita.

1. *Pooling of Information*

Perlu menghimpun informasi yang menyangkut bidang usaha yang digeluti, khususnya mengenai informasi harga dan permintaan pasar atas produk yang dihasilkan. (Hendra Halwani, 1993)

Menurut [Tanri Abeng](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanri_Abeng), perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

* ***Globalisasi produksi***, di mana perusahaan berproduksi di berbagai [negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara), dengan sasaran agar biaya produksi menajdi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah [buruh](http://id.wikipedia.org/wiki/Buruh) yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.
* ***Globalisasi pembiayaan***. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan [investasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi) (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, [PT Telkom](http://id.wikipedia.org/wiki/PT_Telkom) dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari manca negara.
* ***Globalisasi tenaga kerja***. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
* ***Globalisasi jaringan informasi****.*[Masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat) suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV,radio,media cetak dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh : KFC, celana jeans levi’s, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global.
* ***Globalisasi Perdagangan***. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair.

**Syarat bagi dunia usaha agar bisa unggul di era globalisasi**

Karakteristik sederhana perusahaan tangguh adalah kemampuan bersaing di pasar internasional dan mampu mempertahankan pangsa pasarnya.

Peluang Dunia Usaha Dalam Era Globalisasi:

1. Tersebarnya pasar berskala lebih luas dan diversifikasi produk manufaktur dan produk bernilai tambah tinggi.
2. Tersedianya realokasi industri manufaktur dari Negara industri maju ke Negara berkembang dengan upah buruh yang lebih rendah.

Akibatnya siklus proses bahan baku sampai menjadi barang jadi lebih pendek, harga per unit turun dan akan meningkatkan volume penjualan. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan adanya keunggulan komparatif ekonomi Indonesia, meliputi :

Sumber daya alam yang kaya

Sumber daya manusia yang banyak, upah buruh murah

Situasi politik dan keamanan yang stabil (awal 1990-an)

Kebijakan ekonomi yang konsisten (awal 1990-an)

Komponen ekonomi makro yang kuat (awal 1990-an)

Kebijakan Bisnis yang Dilakukan:

Menarik tenaga ahli yang berpengalaman internasional yang dapat melakukan negosiasi dan mengerti hukum yang berlaku di Negara lain.

Perlu diusahakan untuk membuka usaha baru dan mengisi peluang yang tersedia.

Tantangan kompetensi dihadapi dengan peningkatan efisiensi, investasi modal yang makin besar untuk membentuk jaringan internasional dan peningkatan pertumbuhan prasarana ekonomi yang makin cepat.

**Hubungan buruh dan pengusaha**

Karakter bangsa yang kuat dan berlandaskan kesatuan dalam keanekaragaman sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan duniaglobal tersebut. Bangsa Indonesiaadalah bangsa yang terbentuk dari keanekaragaman budaya, karakter, ciri fisik dan nonfisik yang memiliki keunikan masing-masing. Pembangunan nasional pun harus selalu mempertimbangkan ciri khas bangsa yang memiliki keanekaragaman karakter tersebut. Hal ini menjadi faktor kekuatan untuk membangun daya saing bangsa di tingkat global. Selain karakter, Iptek berperan penting dan menentukan dalam kehidupan skala global sebagai daya penggerak kehidupan manusia. Pada sisi lain, laju perkembangan iptek yang sangat pesat, juga akan mempercepat pengusangan (o*bsolence)* berbagai bidang kehidupan*.* Oleh karena itu, tak dapat dielakkan lagi, setiap manusia dan masyarakat/bangsa, dan institusi lainnya harus terus menerus menyesuaikan diri pada kondisi lingkungannya yang terus berubah dengan cepat.Untuk dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang cepat tersebut, setiap manusia tidak dapat terlepas dari tuntutan profesionalime dalam bidangnya masing-masing. Hal inilah yang akan menjadi titik penentu mereka dalam memposisikan dirinya dalam dunia global. Dengan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini, tentu saja profesionalisme saja tidak cukup. Setiap manusia harus memiliki karakter yang kokoh dan positif untuk menunjang profesionalime sehingga mereka memiliki martabat yang baik pula di kalangan masyarakat global.

Terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul guna meningkatkan kesejahteraan maupun pemenuhan hak-hak pekerja seperti keselamatan kerja.Bagi pekerja, tuntutan kenaikan upah menjadi hal yang utama, mengingat harga barang khususnya sembako yang meningkat.Dalam hal ini proses negosiasi diperlukan agar proses operasi dapat berjalan terus tanpa adanya pemogokan.Dengan negosiasi dan perundingan, dapat memberikan kontribusi dan harapan di tengah pencarian pemecahan keluar dari krisis ekonomi.

**Prospek UKM (Usaha Kecil Menengah) dalam era perdagangan bebas**

UKM didefinisikan sebagai usaha-usaha yang memiliki aset sampai dengan Rp 200 juta – meskipun sebenarnya 90% lebih berada jauh di bawah ambang batas kategori itu, yakni memiliki aset kurang atau sama dengan Rp 50 juta. (Mudaris, Alli Masyhud, 1995).Dalam perspektif ini maka koperasi dan pra koperasi primer atau koperasi informal pada umumnya dapat dimasukkan dalam kategori ini.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), populasi UKM ini mencapai 33,45 juta unit, dan lebih dari separuhnya bergerak di sektorpedesaan. Di pedesaan yang lazimnya diusahakan rakyat seperti kerajinan rakyat, pertanian, perkebunan rakyat, aneka pertambangan rakyat, pertambakan dan penggaraman rakyat. Sektor-sektor yang lazim bergerak di perkotaan antara lain jasa perdagangan, transportasi rakyat dan industri makanan rakyat. Disamping itu ada sektor lain yang bergerak baik di pedesaan maupun di perkotaan, yaitu perkreditan rakyat. (Mudaris Ali Masyud, 1995). Jumlah UKM dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam perkembangannya, UKM terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Perkembangan UKM yang khusus bergerak di bidang industri. Sampai akhir PJP-I, jumlah industri kecil dan menengah sekitar 2 juta unit usaha nilai produksi sebesar Rp 20 triliun atau 13,5% dari total produksi industri nasional. Sedang nilai ekspor mencapai US$2,6 miliar atau 10% dari ekspor industri nasional (Chaeruddin, 1995).

Agar supaya dapat unggul di era globalisasi, UKM harus memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Namun, dalam situasi seperti sekarang, keunggulan bisnis dan perekonomian bukan lagi berdasarkan pada strategi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) melainkan strategi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Globalisasi mengubah struktur perekonomian dunia secara fundamental. Interdependensi (saling ketergantungan) perekonomian negara semakin erat. Keeratan interdependensi ini bukan saja berlangsung antara negara maju, tapi juga antara negara berkembang dan negara maju.

**Latihan Soal**

* + 1. **Apa yang dimaksud dengan globalisasi tenaga kerja?**
    2. Sebutkan dampak globalisasi!
    3. Apa syarat bagi dunia usaha agar bisa unggul di era globalisasi

**BAB 14**

**INVESTASI**

**Standar Kompetensi :**

Memahami dan mampu menganalisis tentang investasi.

**Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis arus aliran masuk dan perkembangan investasi di asia timur, struktur investasi yang menunjang pertumbuhan berkualitas, dan iklim investasi di Indonesia

* + - * 1. **Investasi**

Investasi merupakan variabelekonomi yang merupakan penghujungantara kondisi saat ini dengan masa yangakan datang, serta menghubungkan antarapasar barang dengan pasar uang. Investasiadalah suatu istilah dengan beberapapengertian yang berhubungan dengankeuangan dan ekonomi. Istilah tersebutberkaitan dengan akumulasi suatu bentukaktiva dengan suatu harapanmendapatkan keuntungan dimasa depan.Terkadang, investasi disebut juga sebagaipenanaman modal. Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi seperti itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.

Semenjak diberlakukannya undang-undang PMA (Penanaman Modal Asing) dan Undang-Undang PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) investasi cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun demikian pada tahun-tahun tertentu juga terjadi penurunan. Kecenderungan peningkatan bukan hanya berlangsung pada investasi oleh kalangan masyarakat atau sektor swasta baik PMDN maupun PMA, namun juga penanaman modal oleh pemerintah. Ini berarti pembentukan modal domestik bruto meningkat dari tahun ke tahun. Investasi merupakan komponen produkdomestik bruro (PDB).Pada saat resesi, penyebab utamadalam penurunan pengeluaran adalahturunnya investasi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan.

Data pembentukan modal domestik bruto mempunyai dua unsur yaitu pembentukan modal tetap domestik bruto dan ditambah perubahan stok. Pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup pengadaan, pembuatan atau pembelian modal barang baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri. Barang modal yang dibuat atau dibeli sendiri adalah barang tahan lama yang digunakan untuk berproduksi dan biasanya berusia pakai satu tahun atau lebih. Pembentukan modal tetap domestik bruto dibedakan atas:

* + - * + Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi; dan
        + Pembentukan modal tetap berupa mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan, baik yang berasal dari impor maupun hasil produksi dari dalam negeri.

Menurut Dornbuschdalam Kusuma *et al.* (2008) pengertianinvestasi dalam konteks makroekonomiadalah aliran modal yang dikeluarkanuntuk meningkatkan atau menambahmodal dalam bentuk fisik (*physical stockof capital*). Selain memandang investasidengan pendekatan *neoclassical model,*para ekonom juga melihat adanyahubungan antara fluktuasi dalam investasidan fluktuasi dalam pasar saham. Hargasaham cenderung tinggi pada saatperusahaan memiliki banyak kesempatanuntuk berinvestasi mengingat hal tersebutakan meningkatkan pendapatanpemegang saham. Dengan demikian,harga saham mencerminkan insentifuntuk berinvestasi. Faktor yang menghambat investasi:

Faktor Internal

* Prosedur panjang dan berbelit
* Tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah di bidang investasi, serta kebijakan antara sektor
* Kurangnya kepastian hukum
* Kurang kondusifnya pasar tenaga kerja
* Gangguan keamanan di daerah
* Kurangnya insentif investasi, termasuk insentif perpajakan, dalam menarik investasi di Indonesia.

Faktor Eksternal

* Ketidakpastian ekonomi global
* Adanya perubahan sistem ekonomi di negara-negara tertentu
  + - * 1. **Arus modal masuk dan perkembangan investasi di asia timur**

Salah satu fenomena keuanganyang paling mendalam dan meluas adalahpertumbuhan eksplosif dalam transaksikeuangan internasional dan arus modal diantara negara-negara maju danberkembang akibat dari liberalisasi pasarmodal dan kompleksitas dari instrumenkeuangan, serta terintegrasi dalam arusperdagangan dan pembayaraninternasional. Bebasnya arus modal(*capital flows*) dapat meningkatkanalokasi modal global yangmemungkinkan sumber daya untukpindah dari satu Negara ke Negara lain,khususnya ke pasar kekuatan ekonomibaru (*emerging markets*), termasukIndonesia.

Negara berkembang membutuhkan kucuran dana dari luar negeri.Posisi ASEAN sebagai penerima PMA menunjukkan peningkatan pesat sebelum krisis.Sebelum krisis, Malaysia merupakan negara penyerap PMA tertinggi se- ASEAN. Dewasa ini, China sebagai penyerap PMA terbesar.Pertumbuhan tingkat investasi pada saat setelah krisis mengalami perlambatan akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur.Faktor yang menghambat tumbuhnya investasi di negara Asia Timur adalah :

* + Tingginya *country risk*.
  + Kelangkaan kredit
  + Menurunnya investasi publik
  + Dugaan pelarian penanaman modal asing ke China

Meningkatnya arus modal masuk(*capital inflows*) ke Indonesia disebabkanoleh membaiknya pertumbuhan ekonomi,rendahnya suku bunga dan stabilnya nilaitukar rupiah terhadap dolar Amerika.Arus masuk modal asing ini selama inilebih mendominasi ke pasar keuanganyang sifatnya jangka pendek (*hot money*)dan menimbulkan tantangan padakebijakan ekonomi Indonesia. Di satu sisimemberikan dampak positif terhadappeningkatan likuiditas pasar modal, tapidi sisi lain, ekonomi Indonesia tetaprentan terhadap goncangan yang merusaksentimen investor yaitu pembalikanmodal (*capital outflow*) dan ini akanmenyebabkan keretanan ekonomi makro.

* + - * 1. **Struktur investasi yang menunjang pertumbuhan berkualitas**

Pola investasi dapat menentukan stabilitas pertumbuhan ekonomi.Struktur investasi yang menunjang pertumbuhan yang berkualitas adalah kenaikan tingkat investasi akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

* Struktur investasi : primer, sekunder, dan tersier.
* 1995 – 1997 : Investasi di sektor sekunder mendominasi baik untuk PMDN maupun PMA.

Setelah krisis : Investasi sektor sekunder menurun, meskipun masih mendominasi dibandingkan dengan sektor lain.Namun peningkatan investasi belum tentu meningkatkan *share* sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

CIEC (2007) menyatakan bahwa selama tahun 1995 – tahun 2006, sektor primer kontribusi terbesar terhadap pendapatan nasional, diikuti sektor tersier dan sekunder.

* Tingginya kontribusi sektor primer tersebut disebabkan banyak sekali PMA yang menanamkan investasinya di bidang pertambangan
* Sektor tersier : paling menonjol adalah bidang konstruksi.
* Sektor sekunder: paling menonjol adalah industri kertas, pulp, dan percetakan.
  + - * 1. **Iklim investasi di Indonesia**

Penanaman modal oleh pihak swasta di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun seiring dengan situasi ekonomi di tanah air dan dunia internasional. Terhitung sejak 1 Januari 1967 sampai dengan 30 April 1995 secara kumulatif telah disetujui 9.237 proyek PMDN dan 3.383 proyek PMA. Gairah investasi swasta menampakkan tanda-tanda menggembirakan mulai tahun 1980. Nilai investasi yang dimohonkan dan kemudian disetujui meningkat pesat sejak saat itu, terutama penanaman modal dalam negeri. Kemudian tahun 1987 meningkat lebih pesat lagi.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan investasi dari waktu ke waktu, ada tiga macam cara yang bisa dilakukan yaitu:

* + 1. Menyoroti kontribusi pembentukan modal domestik bruto dengan konteks permintaan agregat.
    2. Mengamati data-data PMDN dan PMA.
    3. Menelaah perkembangan dana investasi yang disalurkan oleh dunia perbankan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia :

* + Kualitas infrastruktur
  + Tingkat korupsi
  + Instabilitas makroekonomi
  + Ketidakpastian kebijakan ekonomi
  + Aspek kepastian hukum

Sebagaimana halnya keadaan ekonomi di Indonesia pada umumnya tak luput dari gejala ketidakmerataan. Ketimpangan investasi terjadi secara sektoral dan secara regional.

Ketimpangan/ketidakmerataan investasi:

Secara sektoral

* + - * + Sebagian besar modal yang ditanam, baik modal dalam negeri maupun modal asing tertumpuk disektor industri pengolahan.
        + Ketimpangan sektoral investasi merupakan salah satu sumber ketimpangan pertumbuhan antar sektor. Oleh karenanya mudah dipahami mengapa sektor industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian

Secara regional

* + - * + Ketimpangan regional dalam hal penanaman modal selama ini akan tampak semakin “parah” apabila dibandingkan langsung secara propinsi demi propinsi. Lebih dari sepertiga jumlah PMDN yang disetujui tertanam di Jawa Barat.

Upaya mengatasi ketimpangan:

* + - * + Penyebaran distribusi ke sektor-sektor di luar industri pengolahan dan ke daerah-daerah luar Jawa.
        + Sektor-sektor lain perlu ditanami modal secara signifikan agar bisa mengimbangi pertumbuhan sektor industri pengolahan.
        + Daerah-daerah di luar Jawa perlu disiapkan untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru.
        + Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.

Masalah yang timbul dalam percaturan investasi swasta di tanah air bukan semata-mata persoalan ketimpangan sektoral dan regional. Akan tetapi juga masalah kesenjangan antara rencana yang disetujui dengan realisasi investasinya.

Tantangan dalam mencerahkan iklim investasi Indonesia di masa datang:

1. Tantangan internal

* Ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian yang berupa barang publik.
* Kalangan swasta biasanya enggan menanamkan modal bagi penyediaan barang publik
* Rendahnya produktivitas pekerja dan efisiensi produksi
* Kurangnya tenaga kerja terampil
* Kurang terjaminnya kepastian hukum bagi investor.
  1. Tantangan eksternal
* Persaingan iklim investor dengan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, terutama Cina, Vietnam, Thailand dan India.

Berdampingan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi, tentu saja terdapat berbagai peluang yang kita miliki. Peluang investasi:

* Kemantapan situasi politik di tanah air
* Perkembangan mengesankan dalam kualitas SDM
* Keterbukaan perekonomian
* Keberhasilan pembangunan yang tentu saja kredibilitas tersendiri.

Investasi swasta (PMDN dan PMA) di tanah air signifikan dipengaruhi oleh:

* + - * + Variabel-variabel PDB
        + Tingkat suku bunga, baik didalam negeri maupun di luar negeri
        + Jumlah uang beredar
        + Pengeluaran pemerintah
        + Kebijaksanaan-kebijaksanaan deregulasi yang diluncurkan oleh pemerintah.

Upaya pemerintah:

* Kebijakan pemerintah mengenai reformasi kelembagaan guna memperbaiki persepsi tentang ketidakpastian iklim investasi di Indonesia.
* Kebijakan dalam hal infrastruktur, yakni dengan mentenderkan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
* Bersama BI, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan sektor keuangan guna mengembangkan infrastruktur keuangan, meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat struktur keuangan.

Strategi besar (*grandstrategy*) untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, antara lain:

Perizinan investasi perlu lebih disederhanakan dan secara bertahap diarahkan pada sistem pendaftaran (*registrial system*)

Insentif untuk menarik investasi, termasuk insentif perpajakan perlu dikembangkan.

Kebijakan investasi perlu diintegrasikan dengan kebijakan teknologi, kebijakan ekspor, dan pengembangan daerah dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan ke daerah.

**Latihan Soal**

Jelaskan pengertian investasi dan mengapa investasi penting bagi pembangunan ekonomi?

Investasi mampu meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Jelaskan menurut pendapat anda beserta argumentasinya!

Apa yang menjadi permasalahan sehingga iklim investasi di Indonesia kurang mampu memberikan daya tarik bagi investor (khususnya investor asing)?

Jelaskan hubungan investasi dengan pembentukan modal domestik bruto!

Bagaimanakah perkembangan investasi di Indonesia terutama dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternal?